



**KEDUDUKAN PIDANA SEUMUR HIDUP  
DALAM SISTIM HUKUM PIDANA NASIONAL**

## **TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :  
SYACHDIN, SH  
NIM. B4A 007 078**

**Pembimbing  
Prof. Dr. BARDA NAWAWI ARIEF, S.H.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2009**

**KEDUDUKAN PIDANA SEUMUR HIDUP DALAM SISTIM HUKUM  
PIDANA NASIONAL**

**Usulan Penelitian Tesis**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan**

**Program Magister Ilmu Hukum**

Mengetahui  
Pembimbing

Peneliti

**(Prof Dr. BARDA NAWAWI ARIEF. SH)**  
**NIP.130 350 519**

**(SYACHDIN. SH)**  
**NIM. B4A 007 078**

Mengetahui,

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

UNIVERSITAS DIPONEGORO

**(Prof. Dr. PAULUS HADISUPRAPTO, SH.MH)**

**NIP. 130 531 702**

## **ABSTRAK**

Hukum pidana Indonesia khususnya yang termaktub dalam KUHP berdasarkan alasan historis, politis, dan sosiologis. Perlu dilakukan pembaharuan (mendukung konsep KUHP baru) hal ini memperhatikan nilai – nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk didalamnya Pengenaan Penjara Seumur Hidup. Pemahaman yang demikian seharusnya menjadi dasar pertimbangan dalam membicarakan keberadaan korban pidana seumur hidup. Seiring dengan dasar pertimbangan tersebut dalam Tesis ini dengan Tema Kedudukan Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional, maka sebagai permasalahan yang hendak diungkap adalah : Bagaimana pengaturan pidana seumur hidup dalam hukum pidana nasional saat ini, dan bagaimana pengaturan pidana seumur hidup dalam sistem hukum nasional yang akan datang.

Studi ini bertujuan untuk mengungkap dan menganalisis pengaturan pidana seumur hidup dalam hukum pidana positif saat ini, dan pada sisi lain studi ini juga bertujuan untuk mengungkap pengaturan pidana seumur hidup dalam sistem hukum nasional yang datang

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif yakni Pendekatan Penelusuran kepustakaan (Library Research) dan pendekatan peraturan perundang – undangan (statutory Approach). Data yang digunakan berasal dari sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data ditempuh dengan studi pustaka dan Penelusuran dokumen sedangkan analisis data dilakukan dengan teknik Deskriptif analistis, untuk pendalamannya dikaitkan atau dilengkapi dengan analisis komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dan pengaturan pidana seumur hidup tidak dicantumkan secara eksplisit (dengan tegas) diatur dalam susunan pidana (stelsel pidana) pada Pasal 10 KUHP, akan tetapi pidana seumur hidup dicantumkan dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP. Disamping itu perumusan bentuk ancaman pidananya yang nampak adalah (1) pidana seumur hidup selalu dialternatifkan dengan pidana penjara jangka waktu yakni 20 (dua puluh) tahun. Sedangkan dalam kedudukan pengaturan pidana seumur hidup di luar KUHP menggunakan sistem alternatif kumulasi.

*Kata kunci : Kedudukan pidana seumur hidup*

## **ABSTRACT**

Penal law in Indonesia, as attached in Penal Code in specific, is based on historical, political, and sociological reasons. It is necessary to restore it (supporting the new Penal Code concept) regarding the law values living in public, including the sentence of life age prison. Such understanding should be the fundamental consideration in discussing the existence of the victims of life age punishment. Along with the consideration of this thesis with the theme of Life Age Punishment in National Penal Law System, so the problems discussed are How to regulate penal law punishment in the national penal law today and how to regulate life age punishment in the future national law system.

This study is aimed to reveal and to analyze the regulate of life age punishment in the positive penal law today, and on other side, this study is also aimed to reveal the regulating of life age punishment in the future national law system. This research, applied juridical normative by Library Research and Statutory Approach. The data used is from secondary data sources. The data collection technique was by library study and document exploration. The data analysis was conducted by analytical descriptive technique, and the in-depth analysis was related or equipped by comparative analysis.

The research results showed that the position and regulation of life age punishment are not attached explicitly in penal composition (penal stelsel) of article 10 of Penal Code, but the life age punishment is attached in article 12 section 1 of Penal Code. Besides, the formulation of the forms of punishment threats appeared are: (1) life age punishment always becomes the alternative punishment of dead punishment, (2) life age punishment is always the alternative of the imprisonment punishment with certain period of time, that is 20 years. Whereas, the regulating position of life age punishment out of Penal Code applies the cumulative alternative system.

**Keywords:** The position of life age punishment

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto:**

*"Bersedialah menerima orang lain*

*Dengan segala kerendahan hati,*

*Tetapi jangan paksa dia untuk*

*Menjadi seperti diri kita sendiri"*

### **Kupersembahkan karya ini :**

1. Kepada Alm Ayah tercinta Abdur Razak B. Ali sebagai teladan dan panutan keluarga
2. Kepada Ibu tercinta, yang selalu mendorong untuk keberhasilan demi kesuksesan
3. Kepada isteri tercinta Mawarni dan ketiga anak kami tercinta masing – masing Syafril Faril, Rizki dan Yunita Sari
4. Kepada keluarga, adik-adikku serta ipar yang tersayang terutama Andi Syarif, Tasman, Aslianti, Adran, Rosnani, Vitri Pujiriyanto, SH.SE.MH, Joko Jumadi, Muzakir, Lusiana Primasari, Rina Rahayu, Ni'matul Maula, Christin Sawen, Yanti Amelia dan yang tidak sempat disebut satu persatu

## KATA PENGANTAR

*Bismillaahir Rahmaanir Rahiim,  
Subhanaallah, Waalhaamdulillaah.  
Laa haula wa Laa quwwata illa billaahil 'Aliyil adhiim.*

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran ALLAH SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar dan diberi judul : "**Kedudukan Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional**" dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Dalam penyelesaian tesis ini penulis telah mendapatkan bimbingan, arahan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS.Med.Sp.And selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menyelesaikan studi dalam bidang Ilmu Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang
2. Bapak Prof. Drs. Y. Warella, MPA, Ph.D selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menuntut ilmu di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang
3. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH dan yang amat terpelajar selaku mantan Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro sekaligus sebagai pembimbing dan mengarahkan serta membuka cakrawala berpikir penulis terhadap kemajuan dan perkembangan ilmu hukum ke depan
4. Bapak Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH, MH sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro saat ini sekaligus pembimbing metodologi, semua tim penguji yang penuh dengan

perhatian dan kesabaran mendampingi dan membimbing dalam penulisan skripsi ini

5. Bapak/Ibu Guru Besar dan Staf Pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang dengan perantara penyampaiannya penulis mendapat ilmu pengetahuan yang teramat sangat penting tidak hanya untuk karier tetapi juga hidup penulis dimasa depan
6. Ibu Ani Purwanti, SH, M.Hum Sekretaris Bidang Akademik, Sekretaris Bidang Keuangan, staf dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang
7. Rektor Universitas Tadulako, Drs. Sahabudin Mustapa, M.Si yang merekomendasikan penulis melanjutkan kuliah pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang
8. Idham Khalik, SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako yang telah membantu dan memberikan kesempatan bagi penulis melanjutkan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang
9. Bapak Achmad Allang, SH.MH, Bapak Abd. Wahid, SH. MH sebagai Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tadulako yang telah mendorong penulis dan memberi semangat dalam menempuh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang
10. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda Aim. Abdur Razak B. Ali dan Ibu tercinta beserta saudara-saudara dan seluruh keluarga dekat yang telah mendoakan penulis selama ini
11. Teman-teman PMIH terutama di SPP yang selalu memberikan semangat untuk maju bersama-sama dalam menyelesaikan study pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi lebih sempurnanya penelitian selanjutnya.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Semarang, Agustus 2009

Penulis

SYACHDIN, SH



## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Abstrak.....	iii
Abstract.....	iv
Motto dan Persembahan .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi.....	ix
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Pemikiran .....	8
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Penulisan .....	27
<b>BAB II Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>28</b>
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Sistem Hukum Pidana Nasional.....	28
B. Pengertian dan Ruang Lingkup Pidana Penjara Seumur Hidup .....	33
1. Pidana Penjara Seumur Hidup Bagian dari Pidana Penjara .....	33
2. Pidana Penjara Seumur Hidup dalam Sejarah Pidana Penjara Indonesia .....	36

<b>BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan .....</b>	<b>67</b>
A. Kebijakan Pengaturan Pidana Seumur Hidup Dalam Hukum Pidana Positif saat ini.....	67
1. Kedudukan dan Pengaturan PSH dalam KUHP .....	67
2. Kedudukan dan Pengaturan PSH diluar KUHP.....	75
a. PSH dalam Undang – Undang No. 12 /Drt/1951.....	75
b. PSH dalam Undang – Undang No. 5 tahun 1997 .....	76
c. PSH dalam Undang – Undang No. 22 Tahun 1997 ..	77
d. PSH dalam Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 ..	81
B. Kebijakan Pengaturan PSH dalam Sistem Hukum Nasional yang akan datang.....	83
1. Kedudukan dan Pengaturan PSH kaitannya dengan ide rehabilitasi dan resosialisasi .....	83
a. Perwujudan ide pemasyarakatan dalam perumusan sanksi pidana penjara seumur hidup .....	88
b. Perumusan sanksi pidana penjara seumur hidup dalam rangka mewujudkan ide pemasyarakatan.....	94
2. Kedudukan dan Pengaturan PSH dalam kajian perbandingan di beberapa negara.....	140
3. Kedudukan dan Pengaturan PSH dalam Sistem Hukum Nasional yang akan datang .....	147
 <b>BAB IV Penutup .....</b>	 <b>156</b>
A. Kesimpulan.....	156
B. Saran – Saran .....	158
 <b>Daftar Pustaka</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana nasional masih dipandang relevan sebagai sarana penanggulangan kejahatan, hal tersebut nampak dari masih banyaknya tindak pidana yang diancam dengan pidana seumur hidup. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua setua peradaban manusia itu sendiri. Kehadiran sanksi pidana dalam penanggulangan kejahatan menuai kritik, yang menyatakan bahwa pidana merupakan penanggulangan dari kebiadaban kita di masa lalu (*Vestige of our savage past*)<sup>1</sup> yang seharusnya dihindari. Hal tersebut dikarenakan pidana merupakan bagian dari praktek perlakuan manusia terhadap manusia yang lain secara kejam seperti dibakar hidup-hidup, dirajam sampai meninggal dunia, ditenggelamkan ke laut, atau dipenggal leher dengan pedang. Kritik ini berujung pada munculnya gerakan penghapusan pidana yang ingin diganti dengan tindakan (*treatment-maatregelen*), atau yang dikenal dengan “*Abolitionist Movement*”

Terlepas dari pro dan kontra terhadap pidana sebagai instrument penanggulangan kejahatan, tapi kenyataannya pidana tetap

---

<sup>1</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung 1984 Hal 150.

digunakan. Sepanjang sejarah umat manusia dan dipraktekkan di berbagai negara dan bangsa termasuk di Indonesia melalui pencantumannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).

Dilihat dari konsepsi pemasyarakatan, kedudukan pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana nasional pada hakikatnya merupakan “Perampasan Kemerdekaan” seseorang yang bersifat sementara (untuk waktu tertentu) sebagai sarana untuk memulihkan integritas terpidana agar ia mampu melakukan readaptasi sosial. Sehubungan dengan hal itu **Mulder** pernah menyatakan “pidana perampasan kemerdekaan mengandung suatu ciri khas, yaitu bahwa dia adalah sementara, terpidana akhirnya tetap diantara kita”.<sup>2</sup>

Penggunaan pidana penjara seumur hidup harus bersifat eksepsional dan sekedar untuk memberikan ciri simbolik. Sifat eksepsional ini didasarkan terutama pada tujuan untuk melindungi atau mengamankan masyarakat dari perbuatan-perbuatan dan perilaku tindak pidana yang dipandang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat. Terhadap kriteria eksepsional yang demikian inipun hendaknya harus tetap berhati-hati, karena kriteria “membahayakan atau merugikan masyarakat” itupun merupakan kriteria yang cukup sulit. di samping karena kriteria itu dapat bersifat relatif juga, karena pada hakikatnya setiap tindak pidana adalah perbuatan yang

---

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti Bandung 1996, Hal 208.

membahayakan atau merugikan masyarakat. Bertolak dari pemikiran “*relativitas*”, bahwa tidak ada perbuatan yang secara absolut terus menerus membahayakan masyarakat dan tidak ada pelaku tindak pidana yang mempunyai kesalahan absolut atau sama sekali tidak dapat diperbaiki atau memperbaiki dirinya sendiri, maka akan dirasakan lebih aman bila tidak menggunakan pidana penjara seumur hidup yang di dalamnya mengandung unsur “*absolut*” dan “*definite*”. Perbuatan atau orang yang dipandang “membahayakan masyarakat” itu, dapat dinetralisir dengan merelatifkan sifat berbahayanya itu dalam jangka waktu tertentu. katakanlah batas waktu antara 25-40 tahun merupakan batas waktu yang dipandang cukup untuk menganggap bahwa “bahaya” itu telah dihilangkan atau telah dinetralisir.

Dari uraian di atas dapatlah dikonkretkan, bahwa pidana penjara seumur hidup hanya dapat diterima secara eksepsional dalam arti hanya sekedar untuk memberikan ciri simbolik. Jadi tidak untuk benar-benar secara harfiah dijatuhkan, tetapi sekedar untuk memberikan “peringatan” kepada warga masyarakat akan sangat tercelanya perbuatan yang bersangkutan. Tanda peringatan atau simbol itu mengandung arti, bahwa si pelanggar dapat dikenakan maksimum pidana penjara yang cukup lama. Jumlah lamanya pidana penjara ini tidak perlu dicantumkan dalam perumusan delik yang bersangkutan. Secara teknik perundang-undangan, dapat dirumuskan sebagai “maksimum umum” untuk delik-delik yang diancam dengan

pidana penjara seumur hidup. jadi cukup dirumuskan dalam bagian umum KUHP. Dengan demikian, berbeda dengan sistem perumusan yang selama ini digunakan, yaitu pidana penjara seumur hidup dialternatifkan dengan pidana penjara maksimum 20 tahun dalam perumusan delik yang bersangkutan.

Menurut Koesnoe sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, pidana penjara baru dikenal di Indonesia ketika VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) memperkenalkan lembaga “bui” pada tahun 1602 yang kemudian dilanjutkan pada jaman Hindia Belanda menjadi pidana penjara.<sup>3</sup>

Kedudukan pidana penjara seumur hidup dalam sistem hukum pidana nasional semakin kokoh dengan adanya unifikasi WvS (*Wetboek van Strafrecht*) di Indonesia dengan Stb. 1915 – 732 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Dengan diberlakukannya WvS di Indonesia maka secara resmi kedudukan pidana penjara termasuk pidana seumur hidup menjadi salah satu jenis pidana yang ada dalam hukum pidana nasional. Berdasarkan pemaparan di atas terlihat bahwa pidana penjara termasuk pidana seumur hidup merupakan produk hukum Barat/bukan produk asli bangsa Indonesia dan karenanya tidak berasal dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, upaya melakukan reorientasi

---

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dan Penanggulangan Kejahatan dengan pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang 1996, hal 52.

dan reformulasi terhadap pidana seumur hidup dalam kedudukan sistem hukum pidana nasional sangatlah penting.

Penetapan sanksi pidana dalam KUHP mengandung konsekuensi logis-yuridis untuk menjadi alasan bagi pemberlakuan berbagai jenis, susunan dan cara pengenaan sanksi pidana. Oleh karena pencantuman yang demikian, maka menjadi jelas bagi aparat peradilan pidana dalam hal ini hakim untuk mengenakan salah satu dari jenis sanksi pidana, baik pidana pokok maupun pidana tambahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP tersebut kepada terdakwa yang dalam suatu persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana.

Diantara sanksi pidana penjara yang menarik dan penting disoroti dalam kaitannya dengan upaya (1) pengaturan pidana seumur hidup (2) pembinaan dan rehabilitasi narapidana dalam kedudukan dalam sistem hukum pidana nasional, adalah sanksi pidana seumur hidup yang merupakan bagian dari pidana pokok yakni pidana penjara atau pidana perampasan kemerdekaan. Permasalahan yang muncul dan perlu disoroti adalah dengan pengenaan pidana seumur hidup bisakah sejalan dengan prinsip rehabilitasi dan resosialisasi yang menjadi prinsip dasar dari lembaga Pemasyarakatan. Hal ini disebabkan narapidana yang menjalani pidana seumur hidup sukar diharapkan untuk kembali ke dalam masyarakat dan menjalin proses resosialisasi karena itu harus mendekam selamanya di dalam lembaga

pemasyarakatan. Berkaitan dengan hal tersebut menyebabkan lembaga grasi sering menjadi acuan bagi terpidana seumur hidup untuk memperjuangkan nasibnya agar diubah pidananya menjadi pidana jangka waktu tertentu. Jika demikian permasalahannya, maka perlu ditelusuri pula kedudukan dari pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana nasional, di samping ada keharusan mendeskripsikan pelaksanaan pidana seumur hidup, dan proyeksinya terutama menyongsong berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang juga cenderung mempertahankan pidana seumur hidup.

## **B. Rumusan Masalah**

Pidana seumur hidup selalu dialternatifkan dengan jenis pidana penjara waktu tertentu, bahkan sering menjadi alternatif utama dari pidana mati. Pidana seumur hidup berimplikasi luas terutama berkaitan dengan penetapan, pelaksanaan dan eksekusi pidananya termasuk dengan pembinaan terpidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana nasional. Permasalahan mendasarnya adalah bagaimanakah pidana penjara seumur hidup lebih berorientasi kepada tujuan untuk memperbaiki pelaku serta melindungi masyarakat, sehingga memunculkan fokus masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana formulasi pidana seumur hidup dalam hukum pidana positif saat ini?



2. Bagaimana formulasi pidana seumur hidup dalam sistem hukum nasional yang akan datang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Mengungkap dan menganalisis formulasi pidana seumur hidup dalam hukum pidana positif saat ini.
2. Mengungkap dan menganalisis formulasi pidana seumur hidup dalam sistem hukum nasional yang akan datang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, wawasan yang lebih kongkrit bagi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, umumnya bagi aparat penegak hukum, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana nasional yang akan datang dan hasil penelitian ini diharapkan pula memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan

pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan kedudukan pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana nasional.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam menangani dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat peradilan pidana terutama hakim dalam mengenakan sanksi pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana tertentu yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup. Selain menemukan *sentencing guide*, hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan pula kepada aparat lembaga koreksional dalam menyusun program rehabilitasi dan resosialisasi bagi terpidana (narapidana) seumur hidup sehingga memungkinkan terjadi perubahan jenis pidana (modifikasi pidana) dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana dalam waktu tertentu. Dengan terlaksananya modifikasi pidana bagi narapidana seumur hidup diharapkan akan menunjang prinsip resosialisasi dan *reintegrasi* seorang narapidana untuk kembali menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Pengertian Pidana Penjara Seumur Hidup

Pidana penjara seumur hidup (SH) pada dasarnya merupakan jenis pidana absolut (sudah ditentukan waktunya). Dilihat dari sudut

penjatuhan pidana dan juga dari sudut terpidana, pidana seumur hidup itu bersifat pasti (*definite sentence*) karena sifat pidana dikenakan jangka waktu yang pasti (*a definite period of time*), yaitu menjalani pidana sepanjang hidupnya walaupun orang tidak tahu pasti berapa lama masa hidup seseorang di dunia ini. Dilihat dari kenyataan praktek, dapat juga dikatakan bahwa pidana seumur hidup bersifat “*in determinate*” karena si terpidana tidak tahu pasti kapan dia dapat dilepaskan kembali ke masyarakat.<sup>4</sup>

Mengingat hal tersebut menurut Barda Nawawi Arief maka ada kontradiksi ide antara pidana seumur hidup dengan sistem pemasyarakatan. Pidana penjara seumur hidup lebih berorientasi pada ide perlindungan kepentingan masyarakat, sedangkan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan lebih berorientasi pada ide perlindungan/pembinaan dan perbaikan (*rehabilitasi*) si terpidana untuk dikembalikan lagi ke masyarakat. Jadi, dilihat dari ide pemasyarakatan, pada hakikatnya pidana “perampasan kemerdekaan” seseorang hanya bersifat sementara (untuk waktu tertentu), tidak untuk seumur hidup (untuk waktu yang tidak ditentukan).

Sekiranya pidana penjara seumur hidup masih patut dipertahankan<sup>5</sup>, maka kebijakan legislatif mengenai pidana seumur hidup seyogyanya mengintegrasikan ide/konsep perlindungan

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga Edisi Revisi, Citra Aditya Bhakti, Bandung 2005 Hal 237.

<sup>5</sup> *Ibid.* .hal 238.

pemasyarakatan dengan ide/konsep pemasyarakatan serta memperhatikan ide-ide yang tertuang di dalam *Standar Minimum Rules For the Treatment of Prisoners* (yang telah diterima oleh kongres PBB ke-1 mengenai “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offender*” tahun 1955 maupun berbagai pernyataan pada kongres PBB berikutnya (khususnya kongres ke-6 dan ke-8) yang berhubungan dengan masalah pidana seumur hidup.

Menurut peraturan Perundang-undangan (kebijakan legislatif) selama ini sangat sulit bagi narapidana seumur hidup mendapatkan pelepasan bersyarat (*conditional Release “als voor waardelijke invrijheidstelling”*) Pengurangan masa pidana (remisi) maupun proses asimilasi (proses membawa napi dalam kehidupan masyarakat).

Selain itu juga Barda Nawawi Arief<sup>6</sup> menyatakan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

cap jahat (*stigma*) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering disoroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.

Senada dengan beberapa pendapat di atas tentang pidana penjara menurut Tongat bahwa pidana penjara sebagai pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar<sup>7</sup>. Disebabkan sifatnya yang pasti itu, Roeslan Saleh sebagaimana dikutip oleh Tongat<sup>8</sup> menyatakan bahwa orang keberatan terhadap pidana seumur hidup sebab dengan putusan yang demikian, terpidana tidak akan mempunyai harapan lagi kembali ke dalam masyarakat.

Selanjutnya Barda Nawawi Arief<sup>9</sup> memberikan komentarnya tentang Pidana Penjara Seumur Hidup sebagai berikut:

1. Pidana penjara seumur hidup kurang sesuai dengan tujuan filsafat sistem pemasyarakatan, karena pada hakekatnya perampasan kemerdekaan seseorang itu seharusnya hanya bersifat sementara (untuk waktu yang tertentu) sebagai sarana untuk memulihkan integritas terpidana agar mampu mengadakan readaptasi sosial
2. Pidana penjara seumur hidup hanya dapat diterima secara eksepsional, sekedar untuk ciri simbolik akan sangat tercelanya perbuatan yang bersangkutan dan sebagai tanda peringatan

---

<sup>7</sup> Tongat, *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem hukum Pidana di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2001 hal 35.

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> *Ibid* hal 31

bahwa yang bersangkutan dapat dikenakan maksimum pidana penjara dalam waktu tertentu yang cukup lama; jadi tidak untuk benar-benar diterapkan secara harafiah;

3. Sehubungan dengan kesimpulan diatas maka dalam aturan umum Buku I dapat dirumuskan maksimum umum untuk delik-delik yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup. Disamping itu perlu ditetapkan pula pidana minimum umum untuk delik-delik yang diancam dengan pidana seumur hidup itu dengan disertai klausul yang memberi kemungkinan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana di bawah minimum umum tersebut.
4. Pidana penjara seumur hidup hendaknya selalu dirumuskan sebagai alternatif dari pidana mati atau selalu dialternatifkan dengan pidana penjara dalam waktu tertentu.

Pandangan Barda Nawawi Arief di atas paling tidak mengandung 4 (empat) konsepsi dasar tentang pidana penjara seumur hidup, yakni (1) pidana penjara seumur hidup adalah salah satu jenis sanksi pidana yang kurang sejalan dengan falsafah pembinaan dalam sistem pemasyarakatan yang mengandalkan *pola rehabilitasi* dan *resosialisasi*. (2) pidana penjara seumur hidup bersifat eksepsional (perkecualian) bahkan cenderung *berkarakter simbolik*, (3) oleh karena itu untuk delik yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup harus disertai dengan pertimbangan dan pedoman pemidanaan (*sentencing guide*) yang tepat., (4) pidana penjara seumur hidup adalah pidana yang selalu dialternatifkan dengan pidana penjara waktu tertentu atau pidana mati. Ide dasar pemberlakuan sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup terkait pula dengan tujuan pemidanaan (tujuan penjatuhan pidana).<sup>10</sup> Pada dasarnya ada 3 (tiga) teori tujuan pemidanaan, yakni teori *retributive*,

---

<sup>10</sup> Barda Nawawie Arief, *Loc. Cit.*, hal. 35

teori teleologis, dan teori *retributivisme teleologis*. Pandangan/teori retributive ini merupakan pandangan atau teori yang dianggap paling klasik mengenai konsepsi pidana, bahwa setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.

Menurut pandangan ini seorang pelaku tindakan pidana mutlak harus di pidana. Semboyan yang sangat populer dalam era ini adalah darah ganti darah (*blood to blood*), mata diganti dengan mata (*eyes to eyes*) nyawa ganti nyawa. Berdasarkan semboyan yang demikian itulah muncul kemudian pendapat yang menyatakan, bahwa *teori retributive* atau teori pembalasan dalam pidana merupakan *a relics of barbarism*. Bagi penganut pandangan ini maka pidana atas perbuatan yang salah adalah adil, karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh perbuatan jahat, menurut pandangan ini mengandung nilai moral, yang bebas dari akibat lain yang diharapkan lebih lanjut.

Berbeda dengan *teori retributif* yang menekankan pada pentingnya pidana sebagai pembalasan, menurut *Teori Teleologis* pidana digunakan sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai kemanfaatan baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan masyarakat. Dengan demikian, menurut teori ini pidana dimaksudkan sebagai alat pencegahan baik yang bersifat khusus (*special prevention*) maupun yang bersifat umum (*general prevention*) Teori kedua ini melihat *punishment* sebagai cara untuk mencegah atau

mengurangi kejahatan. Premisnya adalah bahwa pemidanaan sebagai tindakan yang menyebabkan derita bagi terpidana, hanya dianggap sah apabila terbukti bahwa dijatuhkannya pidana itu memang menimbulkan akibat lebih baik dari pada tidak dijatuhkannya pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat karena titik tekan teori ini pada aspek kemanfaatan (*utilitas*) yaitu untuk memperbaiki pelaku dan mencegah orang lain melakukan kejahatan, oleh pakar yang lain teori ini disebut sebagai teori/pandangan *utilitarian prevention*.<sup>14</sup>

Bertolak dari prinsip utilitarian dan teleologis bahwa dalam pemidanaan perlu mengintegrasikan fungsi pidana baik yang bersifat retribution maupun utilitarian.. Satu hal yang patut dicatat berkaitan dengan perkembangan teori pemidanaan tersebut adalah adanya pergeseran orientasi pemidanaan dari prinsip menghukum (*punishment for punishment*) yang cenderung mengabaikan aspek hak asasi manusia kearah gagasan/ide pembinaan (*treatment, maatregelen*) yang lebih menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia berkaitan dengan masalah tujuan pemidanaan ini. Hal ini sependapat dengan Muladi<sup>15</sup> yang pada intinya menyatakan, bahwa dalam konteks Indonesia maka teori pemidanaan yang cocok digunakan dalam sistim hukum pidana Indonesia adalah kombinasi tujuan pemidanaan yang didasarkan pada aspek sosiologis, idiologis dan yuridis filosofis masyarakat Indonesia

---

<sup>14</sup> Tongat, *Op.Cit.* hal. 70

<sup>15</sup> *Ibid.* hal 71



sendiri teori pemidanaan ini disebut sebagai teori pemidanaan yang integratif (kemanusiaan dalam sistim Pancasila).

Menurut Muladi<sup>16</sup> tujuan pemidanaan yang demikian didasarkan pada asumsi dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap pengembangan untuk mewujudkan tujuan pemidanaan yang integratif (kemanusiaan dalam sistim Pancasila) seperangkat tujuan tersebut diatas harus terpenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis bertolak dari teori yang dikemukakan Muladi dapat dikemukakan, bahwa dalam konteks Indonesia pemenuhan salah satu tujuan pemidanaan tidak boleh menghilangkan/mengabaikan tujuan pemidanaan yang lain.

## 2. Pengertian Sistim Hukum Pidana Nasional

Bertitik tolak dari uraian diatas, mengenai pidana penjara seumur hidup dalam sistem hukum pidana nasional maka perlu dikategorikan tentang pengertian/ruang lingkup sistem hukum.

“Sistem” artinya suatu kesatuan atau kebulatan pengertian dari unsur-unsur yang saling bertautan antara yang satu dan yang lain<sup>17</sup>. Kemudian Nur Khalif Hazim, dalam Ishaq AR. Elham, menyatakan bahwa kata sistem berarti susunan, kesatuan dari bagian-bagian yang saling bergantung<sup>18</sup>. Sistem merupakan satu kesatuan yang utuh terdiri atas bagian-bagian atau subsistem-subsistem ini saling

---

<sup>16</sup> *Ibid.* .

<sup>17</sup> Hilman Hadikusumo, *Bahan Hukum Indonesia*, Alumni Bandung 2005 hal 22.

<sup>18</sup> ISHAQ, *Dasar-dasar Ilmu hukum*, Sinar Grafika Jakarta 2008, hal 181.

berkaitan yang tidak boleh bertentangan, dan apabila memang terjadi pertentangan, maka selalu ada jalan untuk menyelesaikannya.

Begitu juga dengan sistem hukum haruslah tersusun dari sejumlah bagian yang dinamakan subsistem hukum yang secara bersama-sama mewujudkan kesatuan yang utuh. Sistem hukum bukan sekedar kumpulan peraturan hukum, tetapi setiap peraturan itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya, serta tidak boleh terjadi konflik atau kontradiksi diantara subsistem yang di dalamnya.

Jadi sistem hukum di Indonesia seperti dalam sistem hukum positif lainnya terdiri atas Subsistem Hukum Pidana, Subsistem Hukum Perdata, Subsistem Hukum Tata Negara, Subsistem Hukum Administrasi Negara, namun tetap dalam satu kesatuan, yaitu Sistem Hukum Nasional.

Sistem Hukum menurut Lili Rasyiah, dan IB. Wiyasa Putra, yaitu suatu kesatuan sistem yang tersusun atau integritas sebagai komponen sistem hukum, yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri dan terikat dalam satu kesatuan hubungan yang saling terkait, bergantung, mempengaruhi, bergerak dalam kesatuan proses, yakni proses sistem hukum untuk mewujudkan tujuan hukum.<sup>19</sup> Terkait dengan pengertian sistem tersebut diatas Hulsman (sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief) mengemukakan, bahwa sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah “aturan perundang-

---

<sup>19</sup> *Ibid*

undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan”  
*(the statutory Rules Relating to Panel Sanction and Punishment)*<sup>20</sup>.

Apabila pengertian pemidanaan diartikan sebagai suatu pemberian pidana maka pengertian sistem pemidanaan dapat dilihat dari 2 sudut :

(1) Dalam arti luas, sistem pemidanaan dilihat dari sudut fungsional, yaitu dari sudut bekerjanya/prosesnya. Dalam arti luas, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai :

- Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana;
- Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Dengan pengertian demikian, maka sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari subsistem Hukum Pidana Materiel/Substantif, subsistem Hukum Pidana Formal dan subsistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Ketiga subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ditegakkan secara konkrit hanya dengan salah satu subsistem itu.

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang 2007, hal 1.

(2) Dalam arti sempit, sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatif/substantif, yaitu hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif. Dalam arti sempit ini, maka sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai :

- Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan.
- Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Jadi dapat ditarik kesimpulan dari pokok uraian di atas ternyata kedudukan pidana penjara pada umumnya dengan lebih khusus lagi penjara seumur hidup adalah salah satu bagian dari sistem hukum pidana nasional. Jadi sistem hukum pidana nasional diperlukan keterpaduan dan keselarasan antar pembentuk hukum, pengadilan, aparat penegak hukum, aparat pelayanan hukum, serta masyarakat agar peraturan perundang-undangan akan menjadi satu kesatuan yang terpadu dalam proses pembentukan hukum nasional.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian

tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah<sup>11</sup>

Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif; ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang kita coba cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh sebab itu, masih perlu diuji kembali.<sup>12</sup> Metodologi adalah suatu hal yang sangat penting bagi penelitian dan dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam kegiatan penelitian, untuk itu dalam suatu penelitian, peneliti perlu menggunakan metode yang tepat karena ada tidaknya suatu karya ilmiah pertama-tama tergantung pada metode yang digunakan<sup>13</sup>.

#### F.1. Metode pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Artinya pendekatan ini

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 hal 1

<sup>12</sup> Amirudin, dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 hal 19

Lihat juga pendapat Bambang Sunggono, dalam *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Rja Grafindo Persada, Jakarta 1997, hal 27. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah terpegang, ditangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu Research yang berasal dari kata re (kembali) dan to search (mencari) dengan demikian secara logawiyah berarti mencari kembali

<sup>13</sup> Murseh Mursanef, *Pedoman Membuat Skripsi*, Haji Masagung, Jakarta 1981 hal 31

mendasarkan pada suatu tinjauan pandangan hukum dan atau peraturan perundang-undangan dalam memandang pelaksanaan pidana seumur hidup terhadap pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Adapun alasan digunakannya pendekatan ini karena permasalahan yang diteliti berkaitan erat dengan pengungkapan seberapa jauh peranan undang-undang dan aparat penegak hukum (hakim) dalam menjatuhkan pidana seumur hidup dan pandangan-pandangan hukum terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh hakim dalam memandang dan menjatuhkan pidana seumur hidup serta memandang pidana seumur hidup sebagai pidana alternatif pengganti hukuman mati. Dan metode pendekatan ini digunakan pula sebagai suatu sarana dalam mendukung upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya perampasan hak kemerdekaan yang mungkin saja bisa terjadi karena kurangnya pemahaman aparat penegak hukum (hakim) dalam memandang pidana seumur hidup.

## F.2 Spesifikasi Penelitian

Dilihat dari sudut pandang sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian yang lebih mendekatkan pada pendekatan deskriptif analisis. Dengan pendekatan deskriptif,

diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran dan mampu untuk mendeskripsikan permasalahan sebagai mana mestinya. Pendekatan deskriptif pada penelitian ini juga bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.

Menurut Winarno Surakhmad, metode penelitian deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Karena banyak sekali ragam penyelidikan yang demikian, metode penyelidikan deskriptif lebih merupakan istilah umum yang mencakup berbagai teknik deskriptif. Selanjutnya dikatakan pula bahwa pelaksanaan metode-metode deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu.<sup>14</sup>

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Melly G. Tan yang mengemukakan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala dan kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Dalam hal ini mungkin sudah ada hipotesa-hipotesa, mungkin belum, tergantung dari sedikit

---

<sup>14</sup> Soejono, H. Adburrahman, *Op. Cit.*, hal. 22

banyaknya pengetahuan mengenai masalah yang bersangkutan.<sup>15</sup>

Menurut Hadari Nawawie, metode penelitian deskriptif ini mempunyai ciri pokok, yakni:

- 1) Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada setiap penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual;
- 2) Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi rasional.<sup>16</sup>

Sedangkan pendekatan analisis dilaksanakan untuk memberikan suatu hasil analisa atas data-data yang telah didapatkan dari lapangan maupun dari sumber hukum primer maupun sumber hukum sekunder dan data primer serta data sekunder.

Penggunaan deskriptif analisis ini artinya adalah hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran yang menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.<sup>17</sup> Untuk itu, penelitian ini dikatakan deskriptif analisis karena hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tinjauan pidana seumur hidup dan implementasi undang-undang (KUHP) dalam

---

<sup>15</sup> Soejono, H. Abdurrahman, *Ibid*, hal. 22

<sup>16</sup> H. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1983, hal. 63

<sup>17</sup> Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Jakarta, 1988, hal 58



mengatur pidana seumur hidup. Dikatakan analisis karena terhadap gambaran mengenai pidana seumur hidup merupakan suatu pidana yang secara sah merampas hak kemerdekaan seseorang dan termasuk didalamnya adanya pelanggaran hak-hak manusia lain yang secara nyata harus dihilangkan sebagai wujud pertanggungjawaban pidana atas tindakan kriminal yang dilakukannya.

### F. 3 Sumber Data.

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.<sup>18</sup>

#### 1. Data Primer.

Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu :

- Data-data yang diperoleh dari hasil bahan studi pustaka yang menyangkut mengenai pidana seumur hidup dan berdasarkan pada informasi dari pejabat lembaga

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekandi & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada Jakarta 2004, hal 12

pemasyarakatan baik berupa data-data primer maupun wawancara yang mencakup :

- Bagaimana pandangan pegawai lembaga pemasyarakatan terhadap pidana seumur hidup?
- Sejauhmana pengaruh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam memandang tindak pidana yang dapat dikenakan pidana seumur hidup?
- Bagaimanakah eksistensi pidana seumur hidup sebagai alternatif terhadap putusan pidana mati?

## 2. Data sekunder.

Adapun data sekunder yang diperlukan adalah data diperoleh dari study kepustakaan dan dokumentasi yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, baik dari hasil-hasil penelitian terdahulu, peraturan-peraturan, buku-buku literatur, dokumen-dokumen, majalah, koran dan lain-lain yang ada kaitannya dengan pelaksanaan pidana seumur hidup dan eksistensinya dalam sistem hukum di Indonesia.

Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup <sup>19</sup>:

- Pelaksanaan putusan terhadap hukuman pidana seumur hidup;

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji ibid hal 13

- Jenis-jenis tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penjatuhan pidana seumur hidup;
- Kebijakan-kebijakan yang digunakan dalam penjatuhan pidana seumur hidup
- Dan data lain yang diperlukan sesuai dengan perkembangan di lapangan.

Kemudian di dalam penelitian juga diperlukan Bahan Hukum Primer maupun Bahan Hukum Sekunder yang meliputi “

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang ada kaitannya dengan permasalahan diatas terdiri dari:
  - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - Rancangan konsep KUHP baru 2006
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan Peraturan Pelaksanaan;
  - serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian diatas.
2. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya

#### F. 4. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan 2 (dua) teknik pengumpulan data. Kedua teknik pengumpulan data tersebut yakni teknik penelusuran bahan pustaka dan bahan-bahan hukum, dan teknik penelusuran dokumen hukum. Dokumen hukum dimaksud berupa “Keputusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang memuat penetapan penjara pidana seumur hidup, dokumen program pembinaan narapidana seumur hidup dalam rangka perwujudan rehabilitasi, resosialisasi dan reintegrasi narapidana.

#### F. 5 Teknik Analisa Data.

Semua data yang terkumpul baik itu data primer maupun sekunder secara garis besar di analisis dengan menggunakan metode analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Metode kualitatif adalah merupakan suatu jenis metode penelitian yang mempunyai karakteristik berbeda dari penelitian kuantitatif. Namun dalam penelitian mengenai penjatuhan pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana nasional ini mengendepankan pencampuran antara metode analisis kualitatif dan metode analisis kuantitatif.

Alasan penggunaan kedua metode analisis ini adalah adanya dualisme paradigma yang harus diselesaikan dengan metode yang mengedepankan jumlah dan kualitas. Penggunaan ini dimaksudkan dalam menganalisa data yang didapatkan dari penelitian, peneliti mampu menyajikan hasil penelitian dalam suatu jumlah dan memaparkan dalam suatu pembahasan yang didapatkan dari analisa data.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini direncanakan untuk ditulis dalam 4 (empat) bab. Masing-masing bab memiliki uraian tersendiri yang masing-masing saling berhubungan, yakni Bab I tentang Pendahuluan sebagaimana diuraikan di depan. Bab II berisi Tinjauan Pustaka yang menjelaskan mengenai pengertian dan ruang lingkup sistem hukum pidana nasional dan pidana penjara seumur hidup . Bab III uraian hasil penelitian dan pembahasan, yang meliputi: (1) Kedudukan pidana Seumur Hidup dan sekaligus membahas bagaimana formulasipidana Seumur Hidup dalam Hukum Pidana Positif saat ini (2) Kedudukan pidana Seumur Hidup dan sekaligus membahas bagaimana formulasi pidana Seumur Hidup dalam sistem Hukum Pidana Nasional yang akan datang. Bab IV Kesimpulan yang berisi (a) Kristalisasi hasil penelitian dan analisis data keseluruhan; dan (b) Rekomendasi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian dan Ruang Lingkup Sistem Hukum Pidana Nasional

Sistem Hukum Pidana Nasional (selanjutnya disebut SHPN) adalah sistem hukum pidana yang berlaku saat ini di Indonesia. Berdasarkan pemahaman demikian, maka tanpa menyebut kata “nasional”, sistem hukum pidana yang dibahas (dianalisis) ini adalah bernuansa nasional, sebab mengacu pada hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia (*ius constitutum*), baik yang tercantum dalam KUHP maupun di luar KUHP.

Istilah sistem hukum pidana (SHP) menurut Barda Nawawi Arief<sup>20</sup> identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem hukum pidana materiel/substantif, sub-sistem hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Lebih lanjut dikemukakan Barda Nawawi Arief<sup>21</sup> bahwa ketiga sub-sistem itu merupakan satu kesatuan penegakan hukum pidana atau sistem pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ ditegakkan secara konkrit hanya dengan salah satu sub-sistem itu.

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, (a).*RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang. 2008. h.2

<sup>21</sup> *Ibid*

SHP ditinjau dari sistem penegakan hukum pidana atau sistem pemidanaan dapat dibedakan dalam 2 (dua) sudut pandang, yaitu (1) SHP dalam arti luas, dan (2) SHP dalam arti sempit.

Menurut Barda Nawawi Arief<sup>22</sup> SHP dalam arti luas atau SHP ditinjau dari sudut fungsional (dari sudut bekerjanya/ berfungsinya/ berprosesnya) sistem hukum pidana dapat diartikan sebagai (1) keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/ konkretisasi hukum pidana, (2) keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalisasikan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Oleh karena SHP dalam arti luas (SHP fungsional) mencakup sistem pemidanaan dalam hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana.

SHP dalam arti sempit (SHP substantive) atau SHP normatif diartikan sebagai keseluruhan sistem/norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan, atau keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemberian atau penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Berdasarkan pemahaman ini maka SHP normatif/substantive terbatas pada Hukum Pidana Materiil, tetapi dalam pelaksanaannya tidak bisa dilepaskan dari hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.

---

<sup>22</sup> *Ibid*

Kaitan SHP dalam arti luas dan dalam arti sempit tersebut, Hulsman<sup>23</sup> secara umum menyatakan bahwa sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*). Pendapat Hulsman ini jika dikaitkan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia, maka SHP normatif dimaksud dapat dijumpai dalam Buku I KUHP (Pasal 1 -103 KUHP) yang digolongkan sebagai aturan umum (*general rules*), begitu pula SHP yang dijumpai dalam Buku II KUHP dan Buku III serta peraturan perundang-undangan di luar KUHP digolongkan sebagai aturan khusus (*special rules*). Sedangkan SHP dalam arti luas atau dalam arti fungsional meliputi sistem pemidanaan yang terdapat baik dalam hukum pidana materiil, hukum pidana formil (hukum acara pidana), maupun dalam hukum pelaksanaan pidana.

SHP yang diungkap di atas memperlihatkan betapa luas cakupannya (ruanglingkup) karena mencakup kebijakan legislatif, kebijakan aplikatif dan kebijakan eksekusi. SHP dalam kebijakan legislatif tercermin dari kebijakan perumusan sanksi pidana dalam perundang-undangan pidana, baik yang menyangkut susunan pidananya (*strafstelsel*), jenis pidananya (*strafsoort*), bobot pidana (*strafmaat*) maupun pelaksanaan penjatuhan pidana (*strafmodus*).

---

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief (b) *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang 2007. h. 1



SHP dapat juga dilihat dalam kerangka sistem perumusan sanksi pidana, baik yang berbentuk (1) sistem perumusan tunggal/imperatif, (2) sistem perumusan alternatif, dan (3) sistem perumusan kumulatif, (4) sistem perumusan kumulatif-alternatif.<sup>24</sup>

Sistem perumusan sanksi pidana tunggal yakni hanya ada satu jenis pidana saja yang bisa dikenakan kepada terdakwa, dapat berupa pidana penjara saja, atau pidana denda saja. Sistem perumusan sanksi pidana alternatif yakni ada dua jenis sanksi pidana yang dijatuhkan, tetapi hanya satu yang dijalani, misal hakim mengenakan pidana penjara atau pidana denda. Akan tetapi pada umumnya memang demikian bahwa KUHP merumuskan sistem sanksi antara pidana penjara yang dialternatifkan dengan pidana denda. Sistem perumusan sanksi pidana kumulatif artinya bahwa ada dua jenis pidana yang dapat dikenakan/ dijatuhkan sekaligus kepada terdakwa, misal hakim dapat menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda. Sedangkan sistem perumusan sanksi pidana kumulatif-alternatif lazim pula disebut perumusan sanksi gabungan atau campuran. Ciri yang dikenal dari sistem perumusan sanksi pidana campuran ini adalah disertai dengan kata “dan/atau”. Menurut Lilik Mulyadi<sup>25</sup> sistem perumusan sanksi pidana campuran kebanyakan dianut oleh peraturan perundang-undangan di luar KUHP.

---

<sup>24</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi & Viktimologi*, Djambatan, Jakarta. 2007. h. 15-24.

<sup>25</sup> *Ibid.* h. 24

Perumusan sistem sanksi pidana sebagai salah satu cerminan SHP tentunya berada pada tahapan kebijakan legislatif atau formulatif, Kebijakan legislatif ini merupakan tahap kebijakan strategis dan menentukan. Kesalahan pada tahap ini akan berdampak pada kebijakan aplikatif dan kebijakan eksekusi. Muladi dan Barda Nawawi Arief<sup>26</sup> mengemukakan pentingnya tahapan perumusan sanksi pidana pada tahapan kebijakan legislatif berikut ini:

Dilihat sebagai suatu kesatuan proses, maka tahap kebijakan pertama yang dapat pula disebut sebagai tahap kebijakan legislatif merupakan tahapan yang paling strategis. Dari tahap kebijakan legislatif inilah diharapkan adanya suatu garis pedoman untuk tahap-tahap berikutnya. Sebagai suatu tahap yang paling strategis, maka adalah wajar apabila dalam rangka kegiatan pembinaan hukum nasional khususnya dalam rangka pembentukan KUHP Nasional. Tim Pengkajian Hukum Pidana BPHN juga lebih mengutamakan masalah-masalah yang ada pada tahap pertama ini

Produk SHP dari kebijakan legislatif (SHP *in abstracto*) akan digulirkan dalam kebijakan aplikatif, yang berarti SHP dilihat dalam bentuk *in concreto* berupa ditegakkan (dioperasionalisasikan) hukum pidana mulai dari sebelum persidangan (penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan) sampai pada tahapan persidangan dan penjatuan pidana oleh hakim kepada terdakwa. Tahap selanjutnya adalah hasil dari kebijakan aplikasi akan digulirkan dalam kebijakan eksekusi, yang berarti bahwa SHP dilihat melalui tindakan eksekutor untuk

---

<sup>26</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni. Bandung. 1984. h. 173

menjalankan putusan pemidanaan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*).

## **B. Pengertian dan Ruanglingkup Pidana Penjara Seumur Hidup**

### **1. Pidana Penjara Seumur Hidup Bagian dari Pidana Penjara**

Pidana penjara seumur hidup atau disingkat dengan pidana seumur hidup (selanjutnya disebut PSH) adalah sebetulnya bagian dari pidana perampasan kemerdekaan. Perampasan kemerdekaan ini tentu membawa dampak buruk bagi narapidana.

Kaitan dengan dampak buruk dari pidana perampasan kemerdekaan<sup>27</sup> ini Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (*stigma*)

---

<sup>27</sup> Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga Edisi Revisi, Citra Aditya Bhakti, Bandung 2005 h 237.

yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan.

Selain dampak seperti diungkap di atas, ditinjau pula kedudukan PSH. Bahwa kedudukan PSH sebagai bagian dari Pidana penjara adalah termasuk salah satu bentuk pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Sekalipun tidak tercantum secara langsung dalam susunan pidana (*strafstelsel*) pada Pasal 10 KUHP, tetapi PSH merupakan bagian dari pidana penjara, hal ini ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa “pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu”. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) KUHP ini jelaslah bahwa pidana penjara terdiri dari 2 (dua) jenis pidana penjara, yaitu (1) PSH, (2) pidana selama waktu tertentu.

Kedua jenis pidana penjara yaitu (1) PSH dan (2) pidana selama waktu tertentu sebetulnya termasuk “pidana perampasan kemerdekaan” atau pidana perampasan kebebasan orang. Seorang terpidana penjara dikekang kebebasannya sehingga tidak bisa bebas bergerak leluasa di dalam masyarakat, kebebasannya diatur dengan peraturan kepenjaraan (dulu dalam *Getichten Reglemen Stb. 1917 Nomor 708*, sekarang Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

Secara filosofisnya bahwa seseorang dijatuhi pidana penjara seumur hidup adalah orang yang melanggar hukum, dan sudah

barangtentu merasakan penderitaan (pidana). Sehingga pidana penjara cenderung diartikan sebagai pidana pembatasan kebebasan bergerak seorang terpidana, yang dilakukan dengan mengisolasi orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.<sup>28</sup>

Khusus tentang PSH, Barda Nawawi Arief<sup>29</sup> berpendapat bahwa pidana penjara seumur hidup (SH) seperti halnya dengan pidana mati, pada dasarnya merupakan jenis pidana absolut. Oleh karena itu PSH juga masih digolongkan sebagai, pidana yang bersifat pasti (*definite sentence*) karena siterpidana dikenakan jangka waktu yang pasti (*a definite periode of time*) yaitu menjalani pidana sepanjang hidupnya, walaupun orang tidak tahu pasti berapa lama masa hidupnya di dunia ini.<sup>30</sup> Oleh karena ketidakpastian tentang umur seorang narapidana yang dijatuhi PSH itulah, maka timbul pendapat lain bahwa PSH sebetulnya jenis pidana yang tidak pasti (*indeterminate sentence*). Pandangan tentang PSH sebagai *indeterminate sentence* ini ditunjang juga

---

<sup>28</sup> Yesmil Anwar & Adang, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*. Kompas Gramedia. Jakarta, 2008. h.130

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief (c) *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2008. h. 226

<sup>30</sup> *Ibid*

oleh tidak adanya secara eksplisit dirumuskan dalam KUHP tentang batasan tentang jangka waktu pidana seumur hidup. Di dalam Pasal 12 KUHP hanya ditentukan bahwa batas waktu pidana penjara selama waktu tertentu yakni minimal satu hari dan maksimal 15 (lima belas) tahun berturut-turut, dan dasar pembatasan waktu pidana inilah yang memberi batasan minimum (*straf minima*) dan batas maksimum (*straf maksima*).

## 2. PSH Dalam Sejarah Pidana Penjara Indonesia

Jonkers<sup>31</sup> berpendapat bahwa hukuman penjara seumur hidup menerobos asas, bahwa hakim bebas untuk menentukan waktu pidana. Akan tetapi menurut Jonkers<sup>32</sup> undang-undang selalu memberi kemungkinan untuk memilih antara hukuman penjara seumur hidup atau sementara, hingga hakim juga berhubungan dengan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hukuman yang seumur hidup, menurut teori berhak menjatuhkan satu hari. Catatan pertama bahwa memang dengan begitu banyaknya sanksi pidana penjara yang dicantumkan dalam KUHP maupun undang-undang di luar KUHP dibandingkan dengan jenis pidana pokok lainnya, oleh karena pidana penjara merupakan pidana penjara merupakan satu-satunya pidana pokok yang ada dalam KUHP yang memungkinkan (1) hakim menjatuhkan pidana penjara dalam

---

<sup>31</sup> J.E. Jonkers *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. PT Bina Aksara. Jakarta. 1987. h 297

<sup>32</sup> *Ibid.*

setiap keputusannya, dan (2) dari segi pembinaan akan diadakannya pembinaan secara terencana dan terarah terhadap terpidana, meskipun cita-cita pembinaan dalam bentuk rehabilitasi itu belum sepenuhnya bisa dicapai. Catatan berikut terhadap pandangan Jonkers tentang PSH patut mendapat perhatian berkaitan dengan kebebasan hakim untuk menentukan waktu pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa terutama dalam hal pidana penjara jangka waktu tertentu. Sebab dengan PSH maka hakim sudah tidak ada pilihan lagi tentang waktu pidana yang dijatuhkan selain menjatuhkan PSH, padahal PSH merupakan salah satu jenis pidana terberat yang harus dijalani seseorang narapidana sepanjang hidupnya.

PSH sebagai salah satu jenis pidana penjara, dan tergolong pidana terberat kehadirannya tidak dilepaskan dari sejarah pemenjaraan yang turut menentukan sejarah perjalanan hukum pidana Indonesia. Menurut Kosnoen<sup>33</sup>, pidana penjara baru dikenal di Indonesia ketika VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) memperkenalkan lembaga “bui” pada tahun 1602 yang kemudian dilanjutkan pada jaman hindia Belanda menjadi pidana penjara. Selain “bui”, dikenal pula rumah tahanan yang disebut “*ketingkwartier*” merupakan tempat buat orang-orang perantaraan. Orang-orang tersebut tidak hanya terdiri dari orang-orang yang

---

<sup>33</sup> Kosnoen, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Penerbitan Sumur Bandung. 1964. h.68

dikenakan pidana, tetapi juga ada orang-orang yang disandera dan orang Tionghowa yang datang di Jawa dengan tidak sah.<sup>34</sup> Bentuk rumah tahanan (penjara saat itu) adalah yang disebut “*Vrouwentuchthuis*” adalah tempat buat menampung orang-orang perempuan yang sebagian besar terdiri dari orang-orang perempuan bangsa belanda dan dimasukkan dalam rumah tersebut karena melanggar kesusilaan (*overspel*).<sup>35</sup>

Pemenjaraan atau dahulu dikenal dengan “bui” atau rumah tempat menjalani pidana diatur dalam Pasal 1 *Gestichten Reglemen* Stb 1917 Nomor 708 meliputi *Gevangenis voor Europeanen* (Penjara pusat untuk orang eropa) *Gevangenis voor Vrouwen* (penjara bui untuk wanita); *Lands Gevangenis* (penjara negeri), *hulp gevangenis* (penjara pertolongan), *Civiele Gevangenis* (rumah tutupan buat orang-orang militer). Lebih lanjut dalam Pasal 4 *Reglemen Penjara* itu dijelaskan mengenai orang yang dipenjarakan (terpenjara) menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu (1) orang yang menjalani pidana penjara (*gevangenis straf*), atau kurungan (*hechtenis*), (2) orang yang ditahan buat sementara/orang tahanan preventif, (3) orang yang disandera (*gijzel*).<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.* h.69.

<sup>35</sup> *Ibid.* h. 70

<sup>36</sup> Petrus Irwan Pandjaitan & Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, CV INDHILL.Co. Jakarta. 2007. h. 44



Tercatat bahwa sejarah pemenjaraan di Indonesia dimulai dengan diberlakukannya *Gestichten Reglement* 1917 Stb.708, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Peraturan (Reglemen) penjara yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda sebenarnya merupakan perwujudan dari adanya ketentuan pidana penjara dalam *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S 1918). Pemberlakuan Reglement penjara ini cenderung bersifat diskriminatif karena setiap golongan penduduk dengan penjara masing-masing yang terdiri dari penjara untuk orang Eropa, penjara untuk orang di luar orang Eropa. Pemberlakuan Reglemen penjara selain diskriminatif, seringkali menjadi dasar pemberlakuan kasar dan kejam terhadap orang tahanan dan narapidana karena sepenuhnya bermotif pembalasan, Tercatat hanya ada 2 (dua) pasal yakni Pasal 65 dan Pasal 66 yang menyangkut pembinaan, selebihnya adalah aturan-aturan yang bersifat keamanan dan mengatur tata tertib.<sup>37</sup>

Konteks sejarah singkat pidana penjara seperti diungkap di atas, sebetulnya tidak dapat dilepaskan dari sejarah terbentuknya W.v.S ( KUHP), karena dengan adanya W.v.S tersebut secara resmi pula diberlakukan pidana penjara (termasuk PSH). Seperti diketahui bahwa KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia dahulunya merupakan jiplakan Code Penal Prancis oleh Kaisar

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

Napoleon dinyatakan berlaku di Belanda pada waktu Prancis di bawah Napoleon menaklukkan Belanda pada permulaan abad kesembilan belas.<sup>38</sup> Pada 1881 di Belanda dibentuk dan mulai berlaku pada 1886 suatu KUHP baru yang bersifat nasional dan sebagian besar mencontoh KUHP Jerman. Berdasarkan *Koninklijk Besluit* tertanggal 15 Oktober 1915 dibuat KUHP baru yang diundangkan dalam Lembaran Negara Hindia Belanda (LNHB) 1915 Nomor 752 maka mulai berlakulah *Wetboek van Strafrecht voor Indonesie* tahun 1915. Akan tetapi berdasarkan *Invoering Verordening* dari *Koninklijk Besluit* tertanggal 4 Mei 1917, LNHB Nomor 497, W.v.S mulai aktif berlaku sejak 1 Januari 1918 bagi semua golongan penduduk di Indonesia. Bersamaan dengan itu berlaku pula *Getichten Reglemen* LNHB 1917 Nomor 708.<sup>39</sup>

Tercatat dalam perjalanan sejarah kepenjaraan sejak pemberlakuan Reglemen Penjara 1917 Nomor 708 falsafah kepenjaraan diselimuti oleh tujuan pembalasan. Narapidana yang mendapat pidana berat terutama PSH cenderung mendapat porsi pekerjaan berat pada berbagai ekspedisi, areal tambang, perkebunan besar, perkebunan karet, perkebunan tebu, peternakan hewan, tambak-tambak ikan, percetakan, pembuatan sepatu, pertenunan, bengkel tukang besi, tempat pemukul batu,

---

<sup>38</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Eresco. Bandung. 1986. h. 7

<sup>39</sup> Petrus Irwan Pandjaitan & Samuel Kikilaitety, *Op.Cit.* h. 67.

pembakaran batu merah. Tujuannya semata-mata adalah membuat narapidana jera (penjeraan). Sejarah pemenjaraan yang buruk tersebut dan tidak manusiawi terjadi di bawah KUHP (W.v.S) yang masih digunakan di Indonesia saat ini walaupun terjadi tambal sulam, namun tidak mengubah secara total prinsip-prinsip liberalisme dan kapitalisme.

Pidana penjara yang meninggalkan derita sejarah Bangsa Indonesia, walaupun begitu hingga kini masih tetap dipergunakan, karena memang pada dasarnya pidana penjara adalah salah satu jenis pidana yang paling banyak digunakan untuk menanggulangi kejahatan. Selain itu pidana penjara dalam wujudnya merupakan reaksi negara akibat adanya kejahatan, dan kemudian oleh negara mencantumkan dalam peraturan perundang-undangan negara untuk diberlakukan.

Perjalanan sejarah pemenjaraan di Indonesia yang terkesan suram itu menggugah Sahardjo (saat itu menteri kehakiman R.I. 1963) di dalam pidatonya saat menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963 dalam Ilmu Hukum mengemukakan judul pidato ilmiah dengan topik "Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila Manipol/Usdek". Sahardjo selain mengemukakan Hukum Nasional yang digambarkan dengan pohon beringin yang melambangkan pengayoman, juga dikemukakan pandangannya tentang pohon

beringin itu sebagai penyuluh bagi para petugas dalam memperlakukan narapidana, sehingga tujuan dari pidana penjara oleh beliau dirumuskan sebagai di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna.<sup>40</sup> Konsepsi Sahardjo sangat manusiawi bahkan ide dasar pemasyarakatannya telah maju, akan tetapi tenggang waktu 1963–1995 adalah waktu yang cukup lama. Tenggang waktu yang dimaksud adalah Sahardjo mengungkap pidotanya 1963, tiga puluh dua tahun kemudian yakni 1995 baru dikeluarkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Jika kita lihat sejarah perkembangan pidana penjara sebagai wahana untuk melaksanakan pidana, yaitu suatu pembatasan kebebasan bergerak terhadap seorang terpidana, sudah dikenal orang sejak abad ke-16<sup>41</sup>. Bahkan diperkirakan penjara dalam bentuk sederhana sudah ada sejak abad ke-13 di Florence Perancis.

Pada masa itu penjara dilakukan dengan menutup para terpidana di menara-menara, di puri-puri, di benteng-benteng yang gelap dan kotor, sehingga sangat tidak manusiawi. Dengan

---

<sup>40</sup> R. Achmad S Soemadi Pradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Bandung, Bina Cipta, Bandung. 1979. h 12-13

<sup>41</sup> Lamintang, *Kitab Pembelajaran Hukum Pidana*, Pioner, Bandung, 1992, hal. 56

menempatkan terpidana pada tempat-tempat tertentu seperti tersebut di atas, atau berupa pembuangan, atau pengasingan dimaksudkan supaya tidak bisa mengganggu masyarakat lagi. Jadi bentuk-bentuk pidana yang berkembang pada masa itu sebagai bentuk awal dari reaksi masyarakat terhadap kejahatan, sama sekali tanpa pertimbangan mengenai rehabilitasi atau pengembalian pelaku tindak pidana ke masyarakat dengan segala hak-haknya.<sup>42</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian pidana merupakan perwujudan dari rasa kebencian masyarakat dan sebagai pengungkapan rasa takut masyarakat terhadap para pelanggar hukum. Oleh karena itu sistem koreksi dari masyarakat pada saat itu, selain bertujuan agar pelaku tindak pidana tidak mempunyai keinginan untuk melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum, juga sekaligus dimaksudkan untuk melindungi masyarakat. dalam hal ini faktor pembalasan menjadi dasar utama dalam penjatuhan pidana.

Menurut perkiraan Sutherland sampai di tahun 1670 masih belum dikenal pidana penjara<sup>43</sup> tetapi sudah ada suatu bangunan yang penggunaannya mirip penjara pada pertengahan abad 16, yang dikenal sebagai Bridewell, bertempat di bekas istana Raja

---

<sup>42</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 1992

<sup>43</sup> Bambang Purnomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan hukum Pidana Kualifikasi; Seri Hukum Pidana I*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1988, hal. 40

Edward Bridewell digunakan untuk penampungan bagi pengemis, gelandangan, dan anak-anak terlantar yang disebut *thriftless poor*, untuk melatih kerja.

Di negeri Belanda, pada akhir abad ke-16 mulai didirikan lembaga penerbitan yang dikenal sebagai *tuchthuis* yaitu rumah penjara untuk menjalankan pidana yang sifatnya berat. Selain itu ada juga *rasphuis* untuk terpidana wanita.<sup>44</sup> Berbagai upaya dilakukan agar perlakuan tidak manusiawi terhadap para narapidana diperbaiki dan diubah dengan perlakuan yang lebih baik.

Dalam hal ini orang yang berjasa mengubah dan membawa wawasan baru mengenai lembaga penjara adalah John Howard seorang berkebangsaan Inggris, Howard yang menulis bukunya yang terkenal "***The State of the Prisons***" didasarkan atas penelitian dan pengalamannya menjelajahi penjara- penjara di Inggris dan daratan eropa, telah membawa pengaruh bagi pembaruan-pembaruan dalam pembinaan narapidana.

Selain itu sumbangan pemikiran yang diberikan oleh Jeremy Bentham dan Cesare Beccaria dalam upaya untuk memperbaiki keadaan penjara. Beccaria tujuan pemberian penjara adalah penderitaan tapi harus dicapai dengan pidana yang berperikemanusiaan, pidana yang baik yaitu jangan terlalu lama

---

<sup>44</sup> Lamintang, *Hukum Penentensier*, Armico, bandung, 1984, hal. 57

dipenjarakan dan penjaranya pun cukup baik. Sedangkan Bentham merencanakan suatu rumah penjara dengan sel beratap kaca, untuk menghapus kesan rumah suram penjara sebagaimana pernah diungkap oleh John Howard.<sup>45</sup> Berbagai upaya untuk merubah citra rumah penjara tersebut, walaupun tidak pernah terwujud di Inggris tetapi memberikan pengaruh pada perkembangan rumah penjara di Eropa dan Amerika.

Di Amerika pada awal abad ke 18 terkenal adanya *country jail*, *house of corrections* dan *penitentiary*. *Country jail* digunakan untuk menahan orang-orang yang sedang menunggu sidang pengadilan serta digunakan untuk tempat para debitur yang tidak mampu melunasi hutangnya. Sedangkan *house of corrections*, digunakan untuk menahan para pelanggar hukum yang bersifat ringan. *Penitentiary* digunakan sebagai tempat untuk menahan para pelanggar hukum yang sifatnya berat. Perkembangan penjara selanjutnya di Amerika adalah dengan dibukanya penjara yang pertama di Philadelphia tahun 1776, yaitu **Walnut Street Jail**. Kemudian pada tahun 1829 dibuka penjara yang kedua di Cherry Hill, Pennsylvania<sup>46</sup>

Penjara di Pennsylvania kemudian melahirkan **Pensylvania System** atau "**Silent System**". Pada sistem ini, para narapidana

---

<sup>45</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Indonesia, Pradya Paramita, Jakarta, 1986, hal. 82

<sup>46</sup> Muladi, *Op., Cit*, hal. 95

ditempatkan dalam selnya masing-masing, siang maupun malam hari. Para narapidana dilarang berbicara dengan narapidana yang lain<sup>47</sup>. Perkembangan penjara di Amerika berikutnya adalah di kota Auburn New York yang kemudian melahirkan **Auburn System**. Pada sistem ini narapidana diperbolehkan membaur dengan sesamanya dan bebas berbicara dengan sesama narapidana.

Kedua sistem penjara yang berkembang di Amerika tersebut bersifat konvensional dengan ciri-ciri sebagai berikut. Pertama tujuan pidana adalah sebagai pembalasan yang dilakukan petugas kepada narapidana supaya menjadi jera. Kedua narapidana dianggap sebagai obyek perlakuan oleh petugas penjara. Ketiga kepada narapidana yang melanggar tata tertib penjara wajib dikenakan pidana badan. Keempat cara-cara perlakuannya tidak layak dan tidak berperikemanusiaan.

Menurut Bernes dan Teeters penjara dengan sistem Pennsylvania dan Sistem Auburn dikelola dengan organisasi kepenjaraan yang sangat jelek, sehingga perlakuan yang tidak layak masih sering terjadi. Dijelaskan juga hal-hal yang menyebabkan pengelolaan penjara sangat jelek yaitu minimnya dana bantuan pemerintah, lemahnya kepemimpinan dari kepala penjara, penghuni penjara yang melebihi daya tampung, tingkat

---

<sup>47</sup> Andi hamzah, *Op., Cit*, hal. 83



pendidikan pegawai penjara yang rata-rata rendah, juga karena pengaruh stabilitas politik pemerintahan waktu itu.

Selain kedua sistem di Amerika tersebut juga terdapat sistem progresif yang berkembang di Inggris dan Irlandia. Sistem ini berupaya untuk memberikan suatu pengalaman bagi seseorang bahwa masuk penjara diharapkan menjadi kenangan yang tidak menyenangkan agar merasa jera dan tidak ada keinginan untuk mengulangi masuk penjara lagi. Dalam sistem tersebut diupayakan adanya peralihan dari hidup bebas berubah menjadi tidak bebas (masuk penjara) yang dilakukan dengan sangat tajam. Sebaliknya perubahan dari penjara menuju kebebasan dilakukan secara bertahap dan berangsur-angsur melalui persiapan untuk mampu hidup dengan baik dalam masyarakat<sup>48</sup>

Sistem progresif tampaknya mempunyai kelebihan daripada kedua sistem yang berasal dari Amerika, karena narapidana dipersiapkan terlebih dahulu sebelum kembali ke masyarakat, meskipun demikian sistem Pennsylvania banyak berpengaruh dalam sistem kepenjaraan di Eropa, termasuk juga di Indonesia sebagai peninggalan kolonial Belanda, sedangkan sistem Auburn menjadi model di hampir semua lembaga penjara yang dibangun di Amerika Serikat, yaitu tembok-tembok bangunan yang tinggi, menara-menara pengawas dan deretan dari sel-sel yang

---

<sup>48</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 84

berpalang pintunya<sup>49</sup>. Berbagai gerakan pembaharuan sistem penjara kearah perlakuan terhadap narapidana yang lebih baik berkembang pesat sebagai akibat timbulnya kesadaran penghormatan terhadap martabat kemanusiaan, yang beranggapan bahwa narapidana juga merupakan manusia yang harus dipertahankan sebagaimana mestinya.

Salah satu tokoh gerakan pembaharuan yang berkaitan dengan pengelolaan penjara adalah Alezander Moconochie yang melakukan kegiatannya pada suatu koloni pembuangan pelaku kriminal di Australia. Adapun pembaharuan yang diupayakan adalah untuk merubah lamanya pidana yang didasarkan atas keputusan pengadilan, menggantinya dengan sistem komutasi, yaitu lamanya pidana penjara didasarkan pada perlakuan baik narapidana selama tinggal di dalam penjara .<sup>50</sup>

Di samping itu Moconochie juga menerapkan sistem baru yang dinamakan **Mark System**. Sistem ini membebani para narapidana dengan sejumlah tanda penilaian, yang didasarkan atas berat ringannya kejahatan yang dilakukannya. Untuk itu setiap narapidana harus menebusnya dengan bekerja dan berkelakuan baik. Semakin cepat hal itu cepat tercapai, maka kemungkinan dibebaskan juga semakin cepat .

---

<sup>49</sup> Muladi, *Op. Cit*, hal. 98

<sup>50</sup> Muladi, *Op., Cit.*, hal. 97

Berbagai kemajuan dalam sistem kepenjaraan telah dicapai sebagai akibat perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Moconochie. Dalam kaitan itu Moconochie juga mengeluarkan lima pedoman pokok mengenai bagaimana memperlakukan narapidana. Pertama bahwa pidana tidak saja bersifat sementara, tetapi yang lebih penting adalah usaha merubah sikap dan tingkahlaku yang salah. Kedua bahwa kualitas pekerjaan yang harus berdasarkan kesalahan yang telah dilakukan. Ketiga narapidana harus menghitung sendiri prestasi yang telah diperolehnya berdasarkan aturan yang telah ditentukan oleh petugas. Keempat diadakannya pemisahan terhadap narapidana yang disiplin dan narapidana yang tidak disiplin. Kelima bahwa selama di dalam penjara narapidana harus memperoleh segala sesuatu yang harus diterimanya.

Dengan dasar pembaruan-pembaruan yang dilakukan Moconochie tersebut, maka konsep pidana yang tidak ditetapkan dengan pasti mulai dikembangkan dan mulai dicoba untuk dipergunakan sebagai persiapan narapidana untuk kembali ke masyarakat. Jadi semakin baik tingkahlaku narapidana dalam penjara maka berarti yang bersangkutan semakin siap untuk kembali hidup dengan baik dalam masyarakat. pada hakikatnya konsep itu dilandasi oleh suatu teori bahwa tujuan pidana perampasan kemerdekaan adalah untuk mempersiapkan seorang

narapidana menghadapi kebebasannya kembali, sehingga lamanya pidana penjara tidak pasti tergantung perubahan sikap dan tingkahlaku dari yang bersangkutan.

Pada perkembangan selanjutnya *mark system* dengan beberapa penambahan guna kesempurnaannya diterapkan di Irlandia oleh Walter Crofon. Penambahan itu diantaranya adalah dengan melakukan seleksi terhadap narapidana yang dapat diperbaiki dan narapidana yang tidak dapat diperbaiki. Terhadap narapidana yang dapat diperbaiki dilakukan pembinaan lebih lanjut. Sedangkan kepada yang sukar diperbaiki maka tetap diperlakukan sebagaimana layaknya. Di samping itu dalam sistem yang dikembangkan Crofton juga dikenal adanya ***ticket of leave*** sebagai hak dari narapidana. Hak itu diberikan jika narapidana memenuhi syarat-syarat tertentu.

Tindakan pembaruan dan perubahan sistem kepenjaraan yang lebih berwawasan hak asasi manusia, mencapai suatu titik yang lebih memberikan harapan baru bagi masa depan narapidana setelah menyelesaikan pidananya denda diterimanya *Standar Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1955 setelah melalui proses yang panjang. Hal itu mengingat di dalamnya diatur berbagai ketentuan tentang perlakuan terhadap narapidana, yaitu dimungkinkan menempatkan narapidana di dalam ruang-ruang baik perseorangan maupun

bersama-sama, adanya pendidikan ketrampilan maupun agama, adanya kesempatan untuk tetap memperoleh informasi, serta berbagai hal lainnya yang semuanya mencerminkan perhatian yang sangat besar akan hak-hak asasi manusia dalam mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat.

Dengan ciri-ciri tersebut tampaknya standar minimum rules telah menggabungkan berbagai sistem yang telah ada sebelumnya dengan berbagai penyesuaian demi mengikuti perkembangan yang terjadi dewasa ini.<sup>51</sup>

Berkaitan dengan hal itu perlu dikemukakan bagian akhir dari pembahasan mengenai sejarah perkembangan penjara yaitu tentang yang terjadi di Penjara **Bostfengslet**, di Oslo, Norwegia sebagaimana menurut penelitian dari Stanton Wheeler pada tahun 1969. Pada penjara tersebut jika gerbang penjara dibiarkan terbuka, para narapidana sama sekali tidak berusaha untuk melarikan diri sebagaimana terjadi pada penjara-penjara lainnya. Para narapidana justru mencari tahu pada petugas penjara mengenai apa yang sedang terjadi.<sup>52</sup> Stanton Wheeler menulis bahwa Penjara **Bostfengslet** seperti *a sunday school*. Inilah suatu fenomena yang menarik untuk dipelajari karena berbeda dengan keadaan penjara sebagaimana umumnya. Penjara dengan sistem pengamanan yang ketat saja banyak narapidana yang

---

<sup>51</sup> Muladi, *Op.Cit.*, hal. 102

<sup>52</sup> Sahetapi, *Hukum Pidana*, Citra Aditya bakti, Bandung, 2007, hal. 1

berusaha melarikan diri, apalagi jika gerbang penjara dibiarkan terbuka, pastilah para narapidana berebutan meloloskan diri. Apakah yang terjadi di Penjara **Bostfengslet** disebabkan penerapan Standar Minimum Rules, sebagaimana ditulis Sahetapy bahwa nilai-nilai sosial, aspek budaya dan struktural sangatlah berperan dalam menentukan permasalahan pada lembaga pemasyarakatan<sup>53</sup>

**Perkembangan Sistem Penjara di Indonesia.** Pembahasan mengenai sejarah perkembangan sistem penjara di Indonesia, menurut hasil penelitian Notosoesanto, seorang Kepala jawatan kepenjaraan yang pertama di Indonesia, dibedakan dalam tiga zaman pertama zaman purbakala, Hindu, dan Islam. Kedua zaman kompeni Belanda. Ketiga zaman pemerintahan Hindia Belanda (Hamzah dan Rahayu, 1983: 76). Perbedaan dari Notosoesanto ini masih terlalu sempit, karena tidak mencakup sejarah penjara sesudah Indonesia merdeka.

Sedangkan R.A. Koesnoen membedakan perkembangan pidana penjara ke dalam dua macam, yaitu bentuk pidana penjara kolonial dan bentuk pidana penjara nasional. Perbedaan menurut Koesnoen inilah yang lebih tepat, karena sesuai dengan perkembangan yang terjadi di Indonesia. Jadi pada hakekatnya sejarah perkembangan sistem penjara di Indonesia harus

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal. 2

dibedakan antara masa kolonial dengan masa sesudah Indonesia merdeka, walaupun secara yuridis tidak ada perbedaan. Perbedaan itu terletak pada politik hukum dalam memperlakukan narapidana, karena pada masa kolonial, peraturan bagi narapidana, mempunyai tujuan untuk kepentingan pemerintahan Hindia Belanda sebagai penjajah.<sup>54</sup> Hal itu akan terlihat dalam pemaparan keadaan penjara pada masa sebelum merdeka.

Sistem kepenjaraan pada permulaan masa Hindia Belanda menggunakan sistem diskriminasi berdasarkan Stb 1826 Nomor 16. Dengan peraturan tersebut diadakan pembedaan : bagi bumiputera berlaku pidana kerja paksa, sedangkan bagi bangsa-bangsa eropa berlaku pidana penjara. Penjara pada masa itu dikenal sebagai “bui” yang keadaannya sangat buruk dan menyedihkan. Perbedaan perlakuan narapidana pribumi dan eropa sangat menyolok. Perawatan, makanan, kamar penjara dan fasilitasnya jauh lebih baik bagi bangsa eropa daripada pribumi (bangsa Indonesia)<sup>55</sup>. Keadaan bui yang sangat buruk dengan akibat mudahnya penyakit menular dan berjangkit yang menimbulkan banyak kematian bagi narapidana, benar-benar mencerminkan bui sebagai salah satu bentuk penindasan pemerintahan Hindia Belanda kepada narapidana pribumi.

---

<sup>54</sup> Purnomo, *Op.Cit.*, hal. 126

<sup>55</sup> Andi Hamzah, *Op.,it*, hal.93

Bui merupakan sarana untuk mencegah pribumi merongrong pemerintahan Belanda melalui kejahatan, oleh karenanya pengelolaan bui sama sekali mengabaikan aspek perbaikan lewat pembinaan maupun aspek kemanusiaan. Berbagai laporan penelitian yang dibuat oleh A.J.Swart dan A.W. Rapart membuktikan buruknya keadaan bui dan penanganan narapidana. Dalam hal ini susunan pidana yang tercantum dalam W.v.S Staatblad 1872 Nomor 85 yang berlaku bagi pribumi makin mendukung politik penindasan yang digunakan pemerintah Belanda untuk menangani pelaku-pelaku kejahatan. Susunan pidana tersebut adalah: Pidana mati; Pidana kerja paksa dengan dibelenggu rantai atau dikolong lehernya dengan besi selama 5 sampai 20 tahun; Pidana kerja paksa dengan dibelenggu rantasi atau dikolong lehernya dengan besi selama 5 atau 15 tahun. Pidana kerja paksa sama dengan nomor 3 selama 5 sampai 10 tahun. Pidana kerja paksa selama paling tinggi 5 tahun; Pidana dipekerjakan pada pekerjaan umum selama paling tinggi 3 bulan; Pidana penjara selama paling tinggi 8 hari; Pidana denda .

Berdasarkan susunan pidana tersebut terlihat bahwa pertimbangan terhadap perikemanusiaan sama sekali diabaikan. Jadi politik pemerintah Belanda yang bersifat penindasan terhadap bangsa yang dijajah tersirat dari jenis-jenis pidana tersebut. Demikian juga perlakuan terhadap narapidana terpengaruh oleh



jenis pidana yang ada. Selain itu bangunan bui dibuat sedemikian rupa untuk menciptakan, secara tidak langsung sifat dari penyiksaan dan penindasan terhadap narapidana. Peninggalan nyata dari keadaan bui-bui tersebut diantaranya bui di Nusakambangan dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palu yang lebih populer sebagai tempat pembuangan. Hal itu menjadi lambang keburukan dan kekejaman pelaksanaan pidana penjara pada masa pemerintahan Belanda.

Berbagai upaya untuk perbaikan keadaan penjara pada masa itu telah dilakukan, diantaranya oleh **Stoet van Beele**, yaitu dengan mengirim utusan untuk mempelajari sistem penjara Singapura. Sistem pengelolaan penjara diperbaiki dengan administrasi yang lebih rapi dengan disiplin yang lebih ketat. Pada 1871 dikeluarkan Staatblad Nomor 28 dan 78 yang mengatur sistem klasifikasi bagi narapidana. Pada intinya mengatur tentang pemisahan antara narapidana pribumi dengan narapidana bangsa eropa, antara laki-laki dan perempuan serta antara narapidana berat dengan narapidana ringan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pembinaannya. Pada tahun 1917 dikeluarkan reglemen kepenjaraan, yaitu Getichten Reglemen Staatblad 1917 Nomor 708 yang mulai berlaku 1 Januari 1918. Reglemen tersebut merupakan ketentuan yang mengatur perlakuan terhadap narapidana dan sistem pengelolaan penjara. Reglemen itu terdiri

atas 114 pasal yang merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 29 W.v.S (KUHP). Dengan ketentuan tersebut diharapkan pengelolaan penjara lebih baik dan perlakuan terhadap narapidana menjadi lebih baik.

Pada masa sesudah dikeluarkannya reglemen tersebut, terdapat tiga jenis penjara, yaitu (a) penjara pusat, yang disebut centrale gevangenis, (b) penjara negeri, atau landsgevangenis, (c) rumah tahanan atau huis van bewaring (Hamzah, 1986: 93). Yang pertama merupakan tempat untuk terpidana yang agak berat dengan lebih ringan lebih ringan lebih dari setahun, sedangkan penjara negeri untuk terpidana dengan masa pidana di bawah satu tahun, dan rumah tahanan digunakan untuk terpidana kurungan dan terpidana ringan. Meski sistem penjara dengan dasar reglemen penjara tahun 1917 bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana, tetapi rumusan peraturan yang ada belum selesai dengan perkembangan pembaruan pidana yang tengah terjadi. Sehingga reglemen tahun 1917 tersebut pelaksanaannya tidak sesuai dengan perkembangan pembaruan pidana penjara. Selain itu politik pemerintah kolonial ikut mendukung keadaan tersebut.

Dengan demikian keadaan penjara tetap buruk, juga perlakuan terhadap narapidana. Hal itu dapat dibuktikan dengan pengalaman Soewignjo mantan narapidana pada Penjara Glodok dan Penjara

Pamekasan Madura pada tahun 1928 yang menceritakan pengalamannya sebagai narapidana kepada majalah femina. Berikut ini akan disarikan beberapa perlakuan yang diterimanya :  
Aku akhirnya dijatuhi hukuman empat tahun penjara. Selama dua tahun aku mendekam di penjara Glodok. Bersama teman-teman dalam ruangan luas yang bisa menampung 500 orang. Tak ada fasilitas yang layak. Bilik untuk buang air hanya berupa ruangan seluas dua kali dua setengah meter yang ada ditengah ruangan itu. Sisa hukuman kujalani di Penjara Pamekasan, Madura. Suatu penjara nomor satu di mana aku beberapa kali mendapat hukuman rotan masing-masing 20 pukulan. Penyiksaan ini bagai ritual keji. Tangan dan kakiku diikat kemudian digantung di tiang dari kayu dengan ketinggian 10 sentimeter dari tanah, sehingga kaki tidak bisa menapak bumi untuk menahan sakit akibat pemukulan rotan. Sementara aku disiksa, para pembesar penjara duduk tidak jauh dari tiang penyiksaan, menikmati tontonan yang tidak berperikemanusiaan itu. Pukulan-pukulan rotan berikutnya terasa perih juga, apalagi salah satu algojo Belanda Hansen keliru mendaratkan rotannya. Aku memakinya. Mendengar makianku direktur penjara marah, memerintahkan Hansen untuk merotan lebih keras. Setelah pukulan rotan selesai, ritual sadis yang menyakitkan belum selesai, seorang mantri penjara menghampiri dengan kuas besar, dan dicelupkan pada cairan obat merah.

Kemudian kuas itu menyapu pantatku yang masih pedih terkena lecutan rotan. Aku menahan jeritanku, ketika cairan merah itu beberapa kali mengenai dagingku yang tersayat rotan. Rasa perih yang luar biasa membuat sekujur tubuhku mengigil perih. Dengan terhuyung-huyung aku melewati direktur penjara, mengucapkan terima kasih atas perlakuannya tersebut. Direktur penjara tersinggung, memerintahkan agar aku dimasukkan ke kamar gelap. Dua minggu aku mendekam di kamar gelap dengan jatah makan yang menyedihkan, yaitu nasi, garam sesendok dan air putih. Dalam kamar gelap tangan dan kakiku dirantai bergantian setiap hari. Satu hari tangan kanan dengan kaki kiri dan esoknya tangan kiri dengan kaki kanan. Setelah empat tahun menjalani hukuman, aku tidak segera dilepas. Atas ketentuan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, atas nama Sri Ratu tanggal 31 Desember 1929 aku diasingkan ke Boven Digoel Tahun 1930 aku dipulangkan. Digoel dibubarkan atas laporan Editor Hillen, sesudah mengunjunginya. Menurut Hillen, anggota Volksraad, Digoel menghabiskan dana pemerintah Belanda (Femina, 17/11/1994).

Pengalaman Soewignjo tersebut memberikan gambaran betapa kejamnya dan jauh dari penghormatan HAM karena tujuan utamanya adalah menindas bangsa yang dijajah. Sebenarnya pada tahun 1930, pemerintah Hindia Belanda mengadakan perubahan-perubahan dalam sistem kepenjaraannya, diantaranya

narapidana yang dipenjara satu tahun ke atas diteliti dahulu di clearing house di Surabaya dan Glodok. Tujuannya untuk mengetahui narapidana yang dapat dididik dengan baik dan yang tidak. Narapidana yang bisa dididik ditempatkan di Madiun, Malang dan Sukamiskin. Perubahan lain adalah diadakan sistem sel, yaitu siang hari bekerja bersama dan malam hari tidur di sel sendiri-sendiri. Kemudian petugas penjara diberikan pendidikan-pendidikan tertentu, untuk meningkatkan kualitasnya (Hamzah dan Rahayu 1983: 82). Meskipun dilakukan perubahan-perubahan tersebut, perlakuan terhadap narapidana masih sangat kejam dan tidak manusiawi, seperti yang dialami oleh Soewignjo di atas. Jadi pemerintah Hindia Belanda melalui alat perlengkapannya pada masa itu, dalam praktik penegakan hukum ternyata menerapkan pidana penjara tidak berbeda dari pidana kerja paksa atau pidana badan lainnya. Padahal pidana penjara ketika mulai dikembangkan dimaksudkan untuk menggantikan pidana badan yang jelas tidak manusiawi.

Pada masa pendudukan Jepang tidak ada perubahan, khusus yang menyangkut perlakuan terhadap narapidana yang berwawasan HAM, karena narapidana banyak dimanfaatkan untuk kepentingan militer Jepang dalam rangka mempertahankan pendudukannya di Indonesia. Sesudah Indonesia merdeka, maka secara yuridis keadaan penjara tidak ada perbedaan yang

mendasar karena Gestichten Reglement Tahun 1917 Nomor 708, oleh Jawatan Kopenjaraan Indonesia yang diterjemahkan menjadi Reglemen Penjara masih dianggap layak diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dan Keputusan Presiden RI Nomor 2 tanggal 10 Oktober 1945. Pengelolaan penjara walaupun secara yuridis tidak jauh berbeda dengan masa kolonial, tetapi politik hukum dari pengelolaan penjara sudah sewajarnya harus berubah. Hal itu disebabkan keseluruhan sistem pengelolaan penjara termasuk dasar dikeluarkannya Peraturan Kopenjaraan yaitu Pasal 29 W.v.S yang merupakan alat untuk menindas bangsa Indonesia yang dijajah. Sesudah merdeka pengelolaan penjara dan perlakuan terhadap narapidana harus sesuai dengan kondisi sosial budaya bangsa Indonesia dengan dasar falsafah Pancasila dan UUD 1945. Harus diingat bahwa narapidana yang dibina pada umumnya merupakan bangsa sendiri yang pada akhirnya juga akan bersosialisasi di bumi Indonesia jika selesai menjalani pidana. Oleh karena itu jika pembinaan gagal menjadikan narapidana sebagai manusia yang baik dan kejahatan tidak bisa ditanggulangi, maka ada kemungkinan penjara tidak mampu menampung seluruh narapidana. Kemungkinan yang lebih buruk adalah separuh atau seluruh masyarakat Indonesia akan menjadi penjahat, jika tingkat kejahatan demikian pesatnya dan lembaga pemasyarakatan gagal dalam pembinaannya. Reglemen

penjara diberlakukan setelah diadakan penyesuaian seperlunya, yaitu aturan mengenai mengurus dan mengawasi penjara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 sampai 20, dan Pasal 22, 23 dan 24 dinyatakan tidak berlaku karena dianggap tidak sesuai dengan UUD 1945. Untuk melengkapi kekurangan tersebut segera dibuatkan aturan yang sesuai tentang mengurus dan mengawasi penjara, yaitu berupa Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 25 Februari 1946 Nomor (g) 8/230. Surat Keputusan tersebut kemudian diubah dan ditambah dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 5 Februari 1948 Nomor (g) 8/164 dan Surat keputusan Menteri Kehakiman tanggal 20 Mei 1948 (g) 8/654, serta Surat Keputusan tanggal 7 Juni 1948 Nomor (g) 8/675.

Wewenang Gubernur Jenderal dan Direktur Justisi atas lembaga penjara berubah menjadi wewenang Menteri Kehakiman Republik Indonesia, dan pelaksanaan harian pengelolaan penjara berada pada kepala kepenjaraan pusat dan di daerah dilakukan oleh direktur kepenjaraan. Kemudian pemindahan dan penempatan narapidana ditetapkan dan dikoordinasikan oleh Jawatan Kepenjaraan Pusat yang diatur dengan Surat Edaran Jawatan Kepenjaraan Pusat tanggal 10 November 1952 . Perubahan yang sangat penting sesudah merdeka adalah dihapuskannya hukuman disiplin dengan cambuk rotan. Penghapusan tersebut bukan saja menandai era baru dalam

pengelolaan penjara, tetapi juga merupakan perwujudan ke arah perlakuan narapidana yang berwawasan HAM.

Untuk itu, di Jawatan Kepenjaraan dalam rangka melakukan pembaharuan pidana penjara, telah diadakan serangkaian kegiatan berupa konferensi dinas tanggal 21-25 Juli di Sarangan, misalnya bertujuan menekankan bahwa pada prinsipnya pidana penjara berupaya mengembalikan narapidana menjadi warga masyarakat yang baik, sehingga perlu meningkatkan usaha-usaha kearah pendidikan, pekerjaan narapidana, kegiatan rekreasi, urusan pidana bersyarat dan proses pelepasan bersyarat harus ditingkatkan.

Dengan konferensi tersebut diharapkan akan diperoleh konsep-konsep tentang kebijakan kepenjaraan yang sesuai serta perwujudan dari prinsip-prinsip standard minimum rules, sebagaimana himbauan PBB dalam aturan-aturan dasar kepenjaraan di Indonesia. Hal itu pada perkembangan pembinaan narapidana selanjutnya memang berhasil dilaksanakan walaupun belum dipraktekkan dengan baik. Sebagaimana dinyatakan oleh Muladi bahwa standard minimum rules pada hakikatnya tidak berbeda dengan prinsip-prinsip yang seharusnya terjadi di dalam pembinaan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia.



Sejarah kepenjaraan di Indonesia mulai menunjukkan perkembangan baru, ketika diselenggarakan konferensi tanggal 27 april – 7 Mei 1964 di Lembang. Konferensi tersebut menghasilkan pola pembinaan narapidana yang dinamakan Pemasyarakatan. Pola pembinaan tersebut diilhami oleh pemikiran Dr. Sahardjo pada pidato penerimaan Doktor Honoris Causa pada tanggal 5 Juli 1963. Prinsip-prinsip pokok pemasyaidup sebgarakatan sebagai dasar pembinaan narapidana adalah:

Orang yang tersesat diayomi juga dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagi warga yang baik dan berguna dalam masyarakat, yakni masyarakat Indonesia yang menuju ke tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa finansil dan materil, tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, ketrampilan hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensiil dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi dan berguna dalam pembangunan negara.

Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara. Terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan, baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan atau penempatan. Satu-satunya derita hanya dihilangkannya kemerdekaan.

Tobat tidak dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian

mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.

Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga. Karena itu harus dibedakan pemisahan antara (a) yang residivis dan bukan (b) yang telah melakukan tindak pidana berat dan yang ringan, (c) macam tindak pidana yang diperbuat, (d) dewasa, dewasa muda, anak nakal, (e) orang terpidana dan orang tahanan.

Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya. Menurut faham lama pada waktu mereka menjalani pidana hilang kemerdekaan adalah identik dengan pengasingan dari masyarakat. kini menurut sistem pemasyarakatan mereka tidak boleh diasingkan dari masyarakat dalam arti secara kultural. Secara bertahap mereka akan dibimbing di tengah-tengah masyarakat yang merupakan kebutuhan dalam proses pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan didasarkan pada pembinaan yang *community centered* dan berdasarkan interaktivitas dan interdisipliner approach antara unsur-unsur pegawai, masyarakat dan narapidana.

Pekerjaaaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan negara sewaktu saja. Pekerjaan harus sesuai dengan pekerjaan di masyarakat yang ditujukan kepada pembangunan nasional, karenanya harus ada integrasi pekerjaan narapidana dengan pembangunan nasional.

Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila. Kepada narapidana harus diberi kesempatan dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya, ditanamkan jiwa kegotongroyongan, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan, jiwa bermusyawarah untuk mufakat yang positif. Narapidana harus diikutsertakan dalam kegiatan demi kepentingan umum.

Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat. Tidak selalu ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia adalah penjahat. Narapidana harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia. Sehubungan dengan itu petugas kemasyarakatan tidak boleh bersikap maupun memakai kata-kata yang dapat menyinggung perasaannya.

Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan. Perlu diusulkan agar narapidana mendapat mata pencaharian untuk keluarganya dengan jalan menyediakan/memberikan pekerjaan dengan upah. Bagi pemuda dan anak-anak disediakan lembaga

pendidikan yang diperlukan, ataupun diberi kesempatan kemungkinan mendapatkan pendidikan di luar lembaga.

Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga yang berada di tengah kota ke tempat-tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan.

Dalam prinsip-prinsip pemasyarakatan tersebut tersirat berbagai aspek yang mencerminkan pembinaan yang berwawasan HAM, sesuai dengan standard minimum rules. Menurut Bambang Poernomo terdapat 3 (tiga) hal dalam prinsip pemasyarakatan tersebut, yaitu (1) sebagai suatu tujuan, (2) sebagai suatu proses, dan (3) sebagai metoda pelaksanaan pidana penjara di Indonesia. Kaitan dengan itu Sahetapy menyatakan bahwa konsepsi Sahardjo yang bertalian dengan pemasyarakatan baru adalah mengenai penggantian nama penjara menjadi lembaga pemasyarakatan.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. KEBIJAKAN FORMULASI PIDANA SEUMUR HIDUP DALAM HUKUM PIDANA POSITIF SAAT INI**

##### **1. Kedudukan dan Pengaturan PSH dalam KUHP**

Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) mencantumkan jenis pidana yang diberlakukan di Indonesia. Pemberlakuan jenis pidana ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang penambahan pidana pokok baru dalam Pasal 10 sub a KUHP dengan pidana tutupan, maka selengkapny susunan pidana (*straf stelsel*) terdiri dari :

- a. Pidana Pokok
  - 1. pidana Mati
  - 2. pidana Penjara
  - 3. kurungan
  - 4. denda
  - 5. pidana tutupan
- b. Pidana Tambahan
  - 1. pencabutan hak-hak tertentu
  - 2. perampasan barang-barang tertentu
  - 3. pengumuman putusan hakim

Menurut Pasal 10 KUHP pidana yang diberlakukan terdiri dari (1) pidana pokok dan (2) pidana tambahan, dan kebijakan yang bisa dilihat bahwa susunan pidana diurut dari yang terberat sampai dengan yang teringan. Perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan juga nampak jelas bahwa (1) pidana tambahan dapat

ditambahkan pada pidana pokok dengan perkecualian perampasan barang-barang tertentu diserahkan kepada negara, (2) pidana tambahan bersifat fakultatif, artinya jikalau hakim yakin mengenai tindak pidana dan kesalahan terdakwa, maka hakim tidak harus menjatuhkan pidana tambahan, kecuali untuk Pasal 250 bis dan Pasal 275 KUHP (penyimpanan surat hutang, sertifikat, dividen, bunga dari negara dengan maksud untuk melakukan kejahatan) yang bersifat imperatif, yakni hakim harus menjatuhkan pidana pokok bila tindak pidana dan kesalahan terdakwa terbukti. Akan tetapi dalam penerapannya hakim boleh memilih salah satu dari pidana pokok dan pidana tambahan.

Jika diperhatikan susunan pidana (*strafstelsel*), baik pidana pokok maupun pidana tambahan seperti di atas, maka PSH tidak dicantumkan secara eksplisit (dengan tegas) diatur dalam susunan pidana (*stelsel pidana*) pada Pasal 10 KUHP. Akan tetapi PSH dicantumkan dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP. Selengkapnya ketentuan Pasal 12 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

- (1) pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu;
- (2) pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- (3) pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan (*concursum*), pengulangan (*residive*), atau karena ditentukan dalam Pasal 52.
- (4) pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 KUHP di atas, ternyata bahwa ketentuan tentang PSH hanya diatur dalam satu ayat saja, yaitu Pasal 12 ayat (1), dan pengaturan PSH tidak serinci pengaturan pidana penjara selama waktu tertentu. Untuk maksud tersebut diperlukan pengaturan pelaksanaan PSH, padahal ada cukup banyak tindak pidana dalam Buku II KUHP yang diancam PSH. Tongat<sup>56</sup> menginventarisir ada 8 (delapan) jenis (kelompok) Tindak pidana (kejahatan) dalam Buku II KUHP yang diancam PSH sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Kelompok Jenis Tindak Pidana dalam KUHP  
Yang Diancam Dengan PSH

No	Kelompok Jenis Tindak Pidana	Pasal (ayat) dalam KUHP
01	Tindak Pidana Terhadap Keamanan Ne-gara	104, 106, 107 (2), 108 (2), 111 (2), 124 (2), 124 (3)
02	Tindak pidana terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara	140 (3)
03	Tindak Pidana membahayakan ke-pentingan umum	187 ke-3, 198 ke-2, 200 ke-3, 2002 (2), 204 (2)
04	Tindak Pidana Terhadap Nyawa	339, 340
05	Tindak Pidana Pencurian disertai ke-kerasan atau ancaman kekerasan	365 (4)
06	Tindak Pidana Pemerasan dan Peng-ancaman	368 (2)
07	Tindak Pidana Pelayaran	444
08	Tindak Pidana Penerbangan	479 f sub b, 479 k (1), (2) 479 (1), (2)

---

<sup>56</sup> Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang, UMM Press. Malang. 2004 h. 81

Kelompok kejahatan (tindak pidana) terhadap keamanan negara adalah kelompok tindak pidana yang paling banyak mengancam PSH. Pasal 104 tentang makar membunuh terhadap presiden atau wakil presiden atau membuat tidak dapat memerintah. Pasal 106 tentang makar untuk memisahkan sebagian wilayah negara, Pasal 107 makar untuk menggulingkan pemerintahan, Pasal 111 (2) tentang mengadakan hubungan dengan negara asing dengan maksud menggerakkan untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang. Pasal 124 ayat (2) tentang memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara terhadap musuh pada masa perang, Pasal 124 ayat (3) ke-1 membantu musuh dan ke-2 menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara atau pembrontakan di kalangan angkatan perang. Pasal 140 ayat (3) mengatur tentang makar yang dilakukan secara berencana terhadap nyawa atau kemerdekaan kepala negara sahabat yang berakibat maut, termasuk kejahatan terhadap negara sahabat. Kelompok tindak pidana yang banyak diancam dengan PSH adalah kejahatan yang membahayakan kepentingan umum.

PSH diatur dalam Pasal 187 ke-3 tentang sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, bahaya banjir yang mengakibatkan matinya orang. Pasal 198 ke-2 dengan sengaja menenggelamkan , mendamparkan atau merusak perahu yang



mengakibatkan matinya orang. Pasal 200 ke-3 dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung yang mengakibatkan matinya orang. Pasal 200 (2) tentang kejahatan memasukkan sesuatu ke dalam perlengkapan air minum untuk umum yang mengakibatkan matinya orang, dan Pasal 204 (2) mengatur tentang menjual- menawarkan, menyerahkan atau membagikan barang yang membahayakan nyawa orang dan menimbulkan matinya orang.,

PSH juga diancamkan kepada pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP. Sementara itu PSH diancamkan kepada pelaku pembunuhan berencana seperti diatur dalam Pasal 340 KUHP.

PSH diancamkan kepada kejahatan pencurian yang didahului, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat atau matinya orang sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP. Untuk kejahatan pemerasan dan pengancaman yang mengakibatkan luka berat atau kematian juga diancam dengan PSH seperti diatur dalam Pasal 368 (2) KUHP. PSH diancamkan kepada tindak pidana pelayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 444 KUHP yakni apabila dalam tindak pidana pelayaran itu menimbulkan

matinya orang. Pasal 444 KUHP ini mengancam PSH yang sebelumnya diatur dalam Pasal 438 sampai Pasal 441 KUHP.

PSH dikenakan (diancamkan) juga terhadap tindak pidana penerbangan seperti diatur dalam Pasal 479 f sub b tentang perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai pesawat udara yang mengakibatkan matinya orang. Begitu pula PSH diancamkan terhadap tindak pidana penerbangan yang dilakukan secara bersama sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, dengan rencana lebih dahulu, mengakibatkan luka berat, mengakibatkan kerusakan pada pesawat untuk merampas kemerdekaan seseorang.

Tindak pidana penerbangan yang diancam PSH seperti ini diatur dalam Pasal 479i dan Pasal 479j KUHP. Pada Pasal 479o PSH juga diancamkan terhadap perbuatan pada Pasal 479i, Pasal 479m, dan Pasal 479n, yakni apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih, secara bersama-sama, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, dengan rencana lebih dahulu mengakibatkan luka berat (1) atau dalam ayat (2) perbuatan itu mengakibatkan matinya orang atau pesawat hancur. Pengancaman PSH pada tindak pidana yang disebutkan di atas rasionalisasinya adalah sebagian besar ditujukan kepada kejahatan yang membahayakan nyawa orang (menyebabkan kematian). Kebijakan kedudukan dan

pengaturan PSH dalam KUHP juga dapat ditinjau dari perumusan bentuk ancaman pidananya.

Kebijakan yang nampak adalah (1) PSH hampir selalu menjadi pidana alternatif dari pidana mati, (2) PSH selalu dialternatifkan dengan pidana penjara jangka waktu tertinggi yakni 20 (dua puluh) tahun. Kedua kebijakan terhadap kedudukan PSH dari segi perumusan ancaman sanksi pidananya dapat disimak berikut ini.

Tabel 3.2  
Bentuk Rumusan Ancaman Sanksi Pidana Dengan PSH  
Dalam KUHP

No	Jenis Tindak Pidana	Pasal (ayat) KUHP	Bentuk rumusan ancaman PSH
01	makar terhadap presiden atau wakil presiden	104	Pidana mati atau PSH atau penjara 20 thn
02	berhubungan dengan musuh pada perang	111 (2)	Pidana mati atau PSH atau penjara 20 thn
03	beri bantuan pada musuh waktu perang	124 (3)	Pidana mati atau PSH, atau penjara 20 thn
04	makar terhadap nyawa dengan rencana lebih dahulu	140 (3)	Pidana mati atau PSH, atau penjara 20 thn
05	Pembunuhan berencana	340	Pidana mati, PSH, penjara 20 thn
06	Pencurian dengan kekerasan	365 (4)	Pidana mati, PSH, penjara 20 thn
07	Pemerasan dan pengancaman	368 (2)	Pidana mati, PSH, penjara 20 thn
08	Kekerasan sebabkan seseorang di kapal diserang, nahkoda, pim-pinan dan mereka yang turut serta	444	Pidana mati, PSH, penjara 20 thn
09	Sebabkan pesawat hancur, orang mati	479o (1) – (2)	Pidana mati, PSH, penjara 20 thn

Tabel 3.2 di atas terlihat bahwa dari 19 (sembilan belas) jenis tindak pidana dalam Buku II KUHP tersebut PSH 9 (sembilan) jenis tindak pidana diancamkan sebagai alternatif dari pidana mati. (1) tindak pidana menyebabkan pesawat hancur, orang mati, (2) tindak pidana Kekerasan sebabkan seseorang di kapal diserang, nahkoda, pimpinan dan mereka yang turut serta, (3) tindak pidana Pemerasan dan pengancaman, (4) tindak pidana pencurian dengan kekerasan, (5) tindak pidana pembunuhan berencana, (6) tindak pidana makar terhadap nyawa dengan rencana lebih dahulu, (7) tindak pidana memberi bantuan pada musuh waktu perang, (8) tindak pidana berhubungan dengan musuh pada perang, (9) tindak pidana makar terhadap presiden atau wakil presiden.

Disamping ditinjau dari tindak pidana dan ancaman pidananya, maka PSH ditinjau dari sudut kebijakan pengaturan sistem perumusan sanksi pidana, ternyata PSH dalam KUHP selalu diancamkan dengan bentuk perumusan alternatif. Salah satu pertimbangan adalah PSH termasuk jenis sanksi pidana yang terberat satu peringkat di bawah pidana mati. Oleh karena itu sukar dibayangkan, dan terasa sangat berat apabila kebijakan pengaturan menempatkan bentuk perumusan ancaman sanksi pidana berupa PSH dengan sistem perumusan kumulatif atau kombinasi (campuran, gabungan).

## **2. Kedudukan dan Pengaturan PSH diluar KUHP**

Pengaturan PSH selain dalam KUHP, juga diatur (tercantum) dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Sebagai bahan analisis ada 4 (empat) peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang memuat dan mengatur ancaman sanksi pidana PSH yang akan diungkap, yakni (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

### **a. PSH Dalam Undang-undang Nomor 12/drt/1951**

Undang-undang Nomor 12/drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak memuat ancaman PSH seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau secara bahan peledak”. Perumusan sanksi pidana PSH dialternatifkan dengan pidana penjara dalam waktu tertentu. Di samping itu ditinjau dari

perumusan PSH seperti ini mirip dengan sistem perumusan sanksi PSH di dalam KUHP yang juga mengenal perumusan sanksi PSH dengan sistem alternatif.

b. PSH Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mengancam PSH terhadap tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 59 ayat (2) , Pasal 59 ayat (1) yang dilakukan secara terorganisir. Pasal 59 ayat (1) mencakup perbuatan sebagai berikut:

- (1) Menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
- (2) Memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
- (3) Mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3)
- (4) Mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- (5) Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I.

Ketentuan perumusan sanksi PSH dari Pasal 59 ayat (1) di atas dinyatakan di dalam Pasal 59 ayat (2) yang menegaskan “jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan secara terorganisir dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)". PSH dirumuskan dengan menggunakan sistem alternatif-kumulasi, artinya bahwa sekalipun PSH sebagai alternatif dari pidana mati, tapi juga dikumulasi dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan ditambah dengan denda sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Bentuk perumusan sanksi PSH dengan sistem alternatif-kumulasi ini tidak terdapat dalam perumusan sanksi PSH dalam KUHP.

c. PSH Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997

Di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengancam PSH terhadap tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 87, yang menyatakan bahwa

- (1)Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika golongan I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 (1) a;
- (2)Tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 80 (1) a yang didahului dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 (2) a;

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 (1) a yang dilakukan secara terorganisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 (3) a;
- (4) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba golongan I yang dilakukan secara terorganisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 (3) a.
- (5) Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkoba golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 (1) a;
- (6) Tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 82 ayat (1) a yang didahului dengan permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) a.
- (7) Tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 82 (1) a yang dilakukan secara terorganisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) a.
- (8) Menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberi kesempatan, menganjurkan, memberi kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83 dan 84.



Ketentuan dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 (1)a; perumusan sanksinya yang berkaitan dengan PSH adalah dinyatakan “dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sistem perumusan sanksi PSH mengenal sistem perumusan alternatif-kumulasi, yakni PSH merupakan alternatif dari pidana mati, tetapi juga dialternatifkan dan dikumulasikan dengan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda Rp. 1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah).

Ketentuan dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 (2)a; perumusan sanksinya yang berkaitan dengan PSH adalah dinyatakan dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Sistem perumusan sanksi PSH dalam ketentuan Pasal 80 ayat (2)a ini mengenal sistem perumusan alternatif-kumulasi. Akan tetapi patut dicatat ialah pada Pasal 80 (1) a; tidak dikenal standar minimum penjatuhan sanksi, sementara di dalam Pasal 80 ayat (2)a dikenal standar minimum penjatuhan sanksi pidana penjara maupun pidana denda. Untuk pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pengaturan mengenai ditentukan atau tidak ditentukannya standar minimum dalam satu undang-undang seperti ini tidak diketahui dengan jelas pendirian atau kebijakan dari pembentuk undang-undang ini. Akan tetapi yang patut disoroti bahwa sistem perumusan sanksi alternatif-kumulasi seperti dalam Pasal 80 ayat (2) ini tidak dikenal sebelumnya dalam sistem perumusan sanksi PSH di dalam KUHP.

Sistem perumusan sanksi PSH di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ini relatif bersistem perumusan sanksi yang sama seperti yang diatur dalam pasal-pasal selanjutnya yakni :

- (1) Pasal 80 ayat (3)a, yang menyatakan dipidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- (2) Pasal 81 ayat (3)a, yang menyatakan dipidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda

paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

(3) Pasal 82 ayat (2)a, dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Memperhatikan sistem perumusan sanksi pidana di dalam undang-undang ini, meskipun mengenal sistem perumusan sanksi yang seragam yakni alternatif-kumulasi, akan tetapi tidak seragam dalam penetapan standar minimum khusus pidana, sebab ada pasal yang mencantumkannya, sedangkan pasal lainnya tidak mencantumkan standar minimum khusus tersebut.

d. PSH Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UUTPK) mengatur PSH sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Pasal 3, Pasal 15 dan Pasal 16 UUTPK. Di dalam Pasal 2 ayat (1) UUTPK dinyatakan bahwa :

a. Setiap orang yang dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau

suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara .

- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Di dalam Pasal 15 UUTPK ditegaskan bahwa percobaan, pembantuan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Dengan demikian percobaan, pembantuan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana korupsi merupakan delik yang selesai, yang ancaman pidananya sama dengan jenis tindak pidana korupsi (Pasal 16 UUTPK).

Pasal 12 B ayat (2) UUTPK yang mengatur tentang “delik gratifikasi” mengancam PSH yang selengkapanya dikutip: “Pidana bagi pegawai negeri atau penaseleggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak R. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sistem perumusan sanksi pidana di dalam Pasal 12B ayat (2) UUTPK ini khusus terhadap PSH adalah “alternatif”, yakni alternatif dari pidana penjara waktu tertentu (dinyatakan sebagai pidana singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun).

## **B. KEBIJAKAN FORMULASI PSH DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL YANG AKAN DATANG**

### **1. Kedudukan dan Pengaturan PSH kaitannya dengan ide rehabilitasi dan resosialisasi**

Rancangan Konsep KUHP tetap mempertahankan PSH. Sementara itu PSH sudah ada dalam hukum pidana Indonesia. Sebetulnya PSH mengandung beberapa ide dasar seperti terungkap berikut ini. Pidana Penjara secara resmi baru diterapkan di Indonesia sejak berlakunya KUHP tanggal 1 Januari 1918. Bambang Poernomo<sup>57</sup> menjelaskan bahwa pidana penjara masa itu masih belum dikenal, karena merupakan pidana badan. Pada masa itu belum ada batasan yang tegas untuk membedakan antara pidana badan dan pidana penjara, karena dalam pelaksanaannya berupa nestapa yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum pidana mendapat perlakuan yang sama berupa tindakan penguasa yang membebankan penderitaan jasmani dan rohani kepada seseorang yang menjalani pidana badan. Pada jaman dahulu hanya dikenal pidana mati, pidana badan dan pidana denda.

---

<sup>57</sup> Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty Yogyakarta. 1986. h. 49.

Bila diperhatikan dalam Buku II KUHP, yang mengatur tentang “Kejahatan” dapat dilihat bahwa dari beberapa pidana pokok (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda) sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP, pidana penjara paling banyak diancamkan terhadap pelaku tindak pidana yang ada dalam Buku II KUHP. Sanksi pidana penjara juga banyak diancamkan terhadap tindak pidana yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP, baik dirumuskan secara tunggal secara alternatif, secara kumulatif, maupun secara kumulatif-alternatif dengan sanksi pidana lainnya.

Banyaknya sanksi pidana penjara yang dicantumkan dalam KUHP maupun undang-undang di luar KUHP dibandingkan dengan jenis pidana pokok lainnya, oleh karena pidana penjara merupakan satu-satunya pidana pokok yang ada dalam KUHP yang memungkinkan diadakannya pembinaan secara terencana dan terarah terhadap terpidana.<sup>58</sup> Melalui pidana mati dan pidana denda, pembinaan terhadap terpidana tidak dimungkinkan, sedangkan melalui pidana kurungan, pembinaan terhadap terpidana sifatnya sangat terbatas. Jadi dihubungkan dengan usaha pembinaan terpidana agar menjadi manusia yang berguna maka usaha yang paling sesuai adalah melalui pidana penjara.

---

<sup>58</sup> Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia* Bina Cipta Bandung. 1992.h.6

Namun kalau diperhatikan kecenderungan yang ada sekarang, pidana penjara sebagai sarana represif dewasa ini posisinya cenderung mengalami degradasi, karena mendapat banyak tantangan dan tekanan dari berbagai gerakan yang muncul di Eropa dan Amerika. Sorotan keras terhadap pidana penjara tidak hanya diberikan oleh pakar individu tetapi juga oleh lembaga internasional. Laporan kongres PBB kelima tahun 1975 mengenai Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelaku Kejahatan, ada kecenderungan untuk mengabaikan kemampuan lembaga-lembaga kejahatan (UN Report, 1975 : 32 No.265) Dalam perkembangan selanjutnya muncul gerakan abolisionis di Amerika menekankan reaksinya pada penghapusan sistem penjara (prison abolitionist) dan Eropa menekankan penolakannya terhadap sistem peradilan pidana secara keseluruhannya dimana sistem kepenjaraan merupakan sentralnya yang bersifat represif.<sup>59</sup>

Meskipun mendapat kritikan pidana penjara tetap diperlukan menghadapi bahaya-bahaya tertentu sebagaimana dikatakan Herbert L Packer<sup>60</sup> (1) sanksi pidana sangat diperlukan, kita tidak hidup sekarang maupun di masa yang tanpa pidana, (2) sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia yang kita

---

<sup>59</sup> Disjman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung. 1992. h. 6

<sup>60</sup> Herbert L Packer, *The Limits of The Criminal Sanction*. Stanford University Press California. 1968. p. 364-365. a. *The Criminal Sanction is indispensable, we could not, now or in the foreseeable future, get a long with it.* b. *The Criminal Sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm.*

miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera, serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya itu.

Di Indonesia sampai sekarang pidana penjara masih digunakan. Hal ini dapat kita lihat dalam kebijakan legislatif selama ini masih banyak mencantumkan pidana penjara sebagai salah satu jenis sanksi. Namun demikian usaha-usaha pembaharuan sekarang sedang disusun. Dalam konsep KUHP Baru, pidana penjara masih dialternatifkan dengan pidana denda untuk kejahatan-kejahatan tertentu. Selain itu terdapat tambahan jenis pidana baru, yaitu pidana pengawasan dan pidana kerja sosial.

Kalau diamati seluruh ketentuan KUHP yang menyangkut perumusan sanksi pidana, maka dapat diidentifikasi hal-hal berikut : (1) KUHP hanya menganut dua sistem perumusan yaitu (a) perumusan tunggal (hanya diancam satu pidana pokok); (b) perumusan alternatif. (2) pidana pokok yang diancam/dirumuskan secara tunggal, hanya pidana penjara, kurungan atau denda. Tidak ada pidana mati atau penjara seumur hidup yang diancam secara tunggal. (3) perumusan alternatif dimulai dari pidana pokok terberat sampai yang paling ringan.<sup>61</sup>

Sedangkan dalam undang-undang di luar KUHP, pembuat undang-undang menempuh empat sistem perumusan yaitu (1) sistem perumusan tunggal atau sistem imperatif, (2) sistem

---

<sup>61</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. h. 180.



perumusan alternatif, (3) sistem perumusan kumulatif, (4) sistem perumusan kumulatif alternatif.<sup>62</sup> Namun demikian, kalau dilihat kebijakan legislatif/formulatif dalam merumuskan sanksi pidana penjara, masih banyak yang dirumuskan secara imperatif (baik perumusan tunggal maupun perumusan kumulatif). Hal ini bertentangan dengan dua aspek pokok tujuan pemidanaan yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perlindungan pelaku. Apalagi perumusan secara tunggal jelas tidak sesuai dengan ide dasar dari pidana penjara yang ingin dikembangkan di Indonesia dengan sistem pemasyarakatan. Konsep pemasyarakatan yang bertolak dari ide rehabilitasi dan resosialisasi jelas menghendaki adanya **individualisasi pidana** dan kelonggaran dalam menetapkan pidana yang sesuai untuk terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas, ada dua permasalahan yang ingin dibahas yaitu (1) apakah kebijakan perumusan sanksi pidana penjara dalam perundang-undangan saat ini telah menunjang tujuan dari ide pemasyarakatan, (2) bagaimanakah formulasi kebijakan legislatif mengenai pidana penjara dalam rangka mewujudkan ide pemasyarakatan

a. Perwujudan ide pemasyarakatan dalam perumusan sanksi pidana penjara seumur hidup.

---

<sup>62</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Edisi kedua, Badan Penerbit Undip Semarang. 1996. h. 158

Kalau diperhatikan kebijakan perumusan sanksi pidana penjara dalam KUHP atau perundang-undangan di luar KUHP, dapat dikatakan bahwa kebijakan selama ini belum menunjang atau merupakan perwujudan dari ide pemasyarakatan, yaitu ide rehabilitasi dan ide resosialisasi. Kebijakan perumusan sanksi pidana penjara dalam KUHP atau perundang-undangan di luar KUHP masih banyak yang dirumuskan secara imperatif (baik dirumuskan secara tunggal maupun secara alternatif maupun secara kumulatif). Meskipun melihat kecenderungan yang ada sekarang, sistem imperatif dalam perundang-undangan nampaknya sudah berkurang, sebagaimana dikatakan oleh Roeslan Saleh<sup>63</sup> kebanyakan sistem perundang-undangan sekarang tidak mempunyai sifat imperatif melainkan telah berubah dengan sifat primitif.

Kelemahan utama dari sistem impratif ini adalah sifatnya yang sangat kaku karena bersifat “mengharuskan”. Jadi hakim dihadapkan pada suatu jenis pidana yang sudah pasti (*definite sentence*) dan sangat bersifat mekanik, karena hakim seolah-olah harus menetapkan pidana secara otomatis. Hakim tidak di beri kesempatan dan kelonggaran untuk menentukan jenis pidana lain yang sesuai untuk terdakwa.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1984. h. 19

<sup>64</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. h. 258-259.

Karakteristik yang demikian yaitu bersifat kaku, imperatif, *definite sentence* dan mekanik/otomatis, jelas terlihat, bahwa sistem yang demikian merupakan bukti dari adanya peninggalan atau pengaruh yang sangat mencolok dari aliran klasik yang ingin mengobyektifkan hukum pidana dari sifat-sifat subyektif si pelaku dan tidak memberi kebebasan kepada hakim untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran pembedaan.<sup>65</sup>

Sistem imperatif ini merupakan faktor yang paling dominan atau faktor utama yang tidak mendukung ***kebijakan selektif dan limitatif***. Kedua kebijakan ini tidak hanya berarti harus ada penghematan dan pembatasan pidana penjara yang dirumuskan/diancamkan dalam perundang-undangan, tetapi juga harus ada peluang bagi hakim untuk menerapkan pidana penjara itu secara selektif dan limitatif, ini berarti harus pula tersedia jenis-jenis pidana/tindakan alternatif lain yang bersifat non-custodial.

Faktor kedua yang tidak mendukung kebijakan selektif dan limitatif adalah tidak adanya ketentuan perundang-undangan sebagai katup pengaman (***veiligheidsklep***) yang memberi pedoman dan kewenangan kepada hakim untuk menghindari, membatasi atau memperlunak penerapan pidana penjara yang dirumuskan secara imperatif. Terlebih perumusan tunggal jelas

---

<sup>65</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, edisi revisi, Alumni Bandung.1998. 26

tidak sesuai dengan ide dasar dari pidana penjara yang ingin dikembangkan di Indonesia dengan sistem pemasyarakatan pidana. Dengan masih adanya sistem perumusan tunggal dalam perundang-undangan selama ini, maka sebenarnya terkandung di dalamnya suatu kontradiksi ide. Konsep pemasyarakatan yang bertolak dari ide rehabilitasi dan resosialisasi menghendaki adanya individualisasi pidana yang sesuai untuk terdakwa. Konsep atau ide yang demikian jelas bertentangan dengan sistem perumusan tunggal yang kaku. Ini berarti ide dasar dari pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan tidak dapat disalurkan atau diwujudkan dengan baik lewat sistem perumusan tunggal.

Faktor ketiga, yang tidak mendukung kebijakan selektif dan limitatif adalah lemahnya ketentuan mengenai pidana bersyarat, sehingga kurang dapat mengatasi sifat kaku dari sistem perumusan pidana penjara secara imperatif. Lemahnya ketentuan mengenai pidana bersyarat ini, antara lain adalah<sup>66</sup> di dalam sistem pengawasan dan pembinaan :

- (1) Belum melembaganya pola-pola pengawasan yang dilakukan dan sistem kerjasama di dalam pengawasan;
- (2) Tidak berkembangnya lembaga-lembaga reklasering swasta, yang justru merupakan sarana yang sangat penting di dalam

---

<sup>66</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Cetakan Ketiga, Alumni Bandung, 2002. h. 225-226

pelaksanaan pengawasan dan pembinaan narapidana bersyarat;

- (3) Pasal 280 ayat (4) KUHAP yang mengatur peranan hakim pengawas dan pengamat di dalam pelaksanaan pidana bersyarat belum berfungsi sebagaimana mestinya.

Sedangkan kelemahan atau hambatan dalam perundang-undangan adalah :

- (1) Belum adanya pedoman yang jelas tentang penerapan pidana bersyarat yang mencakup hakekat, tujuan yang hendak dicapai, serta ukuran-ukuran di dalam penjatuhan pidana bersyarat.
- (2) Tidak adanya pedoman penerapan pidana bersyarat tersebut menyebabkan timbulnya pertimbangan-pertimbangan yang berdasar atas subyektivitas hakim di dalam mengadili suatu perkara. Subyektivitas tersebut kadang-kadang terlalu bersifat psikologis yang sama sekali tidak relevan untuk dijadikan dasar penjatuhan pidana bersyarat.

Faktor keempat adalah lemahnya kebijakan legislatif dalam mengefektifkan pidana denda. Untuk mengefektifkan pidana

denda ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan legislatif adalah:<sup>67</sup>

- (1) Sistem penetapan jumlah atau besarnya pidana denda;
- (2) Batas waktu pelaksanaan pembayaran denda;
- (3) Tindakan-tindakan paksaan yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya pembayaran denda dalam hal terpidana tidak dapat membayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan;
- (4) Pelaksanaan pidana denda dalam hal-hal khusus (misalnya terhadap seorang anak yang belum dewasa atau belum bekerja dan masih dalam tanggungan orang tua);
- (5) Pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda.

Sebagai salah satu jenis sanksi alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan, keuntungan dari pidana denda adalah tidak begitu mendatangkan stigma bagi terpidana<sup>68</sup>. Namun perlu pula diperhatikan kelemahan dari pidana ini, yaitu pidana denda yang biasanya diajukan tidak dapat dirasakan sama oleh tiap-tiap terpidana, orang yang mampu tidak berapa merasakan pidana itu. Memang pengaruh ini tidak hanya untuk pidana denda saja. Oleh karena itu dalam penjatuhan pidana

---

<sup>67</sup> Barda Nawawi Arief, *kebijakan legislatif dalam rangka Mengefektifkan Pelaksanaan Sanksi Pidana Denda* dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* h.181-182

<sup>68</sup> Sudarto, *Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Undip, Semarang. 1974. h. 17-18.

denda harus dilihat keadaan dan kemampuan orang yang bersangkutan, sehingga tujuan dari pemidanaan dapat tercapai.

Faktor kelima adalah tidak adanya pedoman penjatuhan pidana penjara yang dirumuskan secara eksplisit dalam perundang-undangan. Di dalam KUHP maupun di luar KUHP tidak diatur mengenai tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan. Di dalam beberapa perundang-undangan di luar KUHP terdapat sistem perumusan ancaman pidana secara minimum khusus, yang merupakan penyimpangan dari sistem KUHP yang menggunakan sistem maksimal. Hal ini akan menimbulkan masalah dalam praktek penegakan hukum mengingat KUHP tidak mengatur sistem minimal khusus. Selain itu dalam perundang-undangan tersebut tidak diatur lebih lanjut mengenai aturan atau pedoman untuk menerapkan sistem minimum khusus. Pedoman penjatuhan pidana penjara ini dimaksudkan untuk memberikan dasar rasionalitas atau untuk memberikan motivasi, mengapa hakim menjatuhkan pidana penjara. Dengan adanya pedoman ini diharapkan ada pegangan bagi hakim dalam hal apa saja seyogyanya ia menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana penjara.

Faktor keenam adalah tidak adanya ketentuan yang memberi kewenangan kepada hakim untuk merubah atau menghentikan sama sekali pelaksanaan putusan pidana penjara

yang telah berkekuatan tetap. Individualisasi pidana<sup>69</sup> tidak hanya berarti bahwa pidana yang akan dijatuhkan harus disesuaikan/diorientasikan pada pertimbangan yang bersifat individual, tetapi juga pidana yang dijatuhkan kepada terpidana harus selalu dapat dimodifikasi/dirubah/ disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan pelaku.

b. Perumusan Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Rangka Mewujudkan Ide Pemasyarakatan

Dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), maka “pemidanaan” yang bisa juga diartikan pemberian pidana tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan.

Mempelajari kebijakan hukum pidana pada dasarnya mempelajari masalah bagaimana sebaiknya hukum pidana dibuat, disusun dan digunakan untuk mengatur/mengendalikan tingkahlaku manusia, khususnya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Jadi ilmu hukum pidana mengandung juga aspek kebijakan penanggulangan kejahatan dan kebijakan perlindungan/kesejahteraan masyarakat. Di lain pihak khususnya dilihat dari kebijakan hukum pidana, sasaran/addressat dari hukum pidana tidak hanya perbuatan

---

<sup>69</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai...*Op.Cit.* h. 102



jahat dari warga masyarakat tetapi juga perbuatan (dalam arti kewenangan/kekuasaan) penguasa/aparat penegak hukum.

Dengan demikian ilmu hukum pidana mengandung pula kajian terhadap aspek “pengaturan dan kebijakan mengalokasikan kekuasaan”, baik kekuasaan untuk menetapkan hukum pidana (*kekuasaan formulatif/legislatif*) mengenai perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan, maupun kekuasaan untuk menerapkan hukum pidana (*kekuasaan aplikatif/yudikatif*), dan kekuasaan untuk menjalankan/melaksanakan hukum pidana (*kekuasaan eksekutif/ administratif*)<sup>70</sup>

Kebijakan legislatif (formulatif) sering juga disebut sebagai kebijakan pemberian pidana “*in abstracto*”, sedangkan kebijakan aplikatif/yudikatif dan kebijakan eksekutif/administratif disebut sebagai kebijakan pemberian pidana “*in concreto*”. Dilihat sebagai suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan pidana itu diharapkan merupakan suatu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam suatu kebulatan sistem.

Kebijakan legislatif (formulatif) merupakan tahap paling strategis dari keseluruhan proses perasionalisasi/fungsionalisasi dan konkretisasi (hukum) pidana.

---

<sup>70</sup> Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek..... *Op.Cit*, h. 99

Kebijakan legislatif ini merupakan tahap awal dan sekaligus merupakan sumber landasan dari proses konkretisasi pidana berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana. Pentingnya landasan legislatif ini bagi suatu kebijakan pemidanaan, dikemukakan antara lain oleh G.P. Hoefnagels<sup>71</sup> :

*I agree with the view that effectiveness is a prerequisite for lawfulness and even an element to be taken into account in sentencing, effectiveness alone is no guarantee of justice, punishment in criminal law is limited not only by effectiveness and purposefulness, but above all by legality.*

Berkaitan dengan pencantuman sanksi pidana penjara dalam peraturan perundang-undangan, dapat dikemukakan bahwa kebijakan legislatif selama ini menganggap sanksi pidana (terutama penjara) sebagai salah satu sarana politik kriminal/kebijakan kriminal.<sup>72</sup> Sebagai salah satu sarana penal, selama ini pidana penjara sering digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, seperti “perlindungan masyarakat”, “pencegahan kejahatan”. Penggunaan sanksi pidana penjara ini seolah-olah sudah merupakan suatu hal yang wajar dalam menanggulangi kejahatan atau masalah-masalah sosial.

---

<sup>71</sup> G.P. Hoefnagels, *The Other Side of Criminology, An Inversion of The Concept of Crime*, Kluwer-Deventer, Holland. 1973. P. 139.

<sup>72</sup> Kebijakan Kriminal di samping dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana (pendekatan penal), dapat pula dilakukan dengan sarana non penal melalui pelbagai usaha pencegahan tanpa harus menggunakan sistem peradilan pidana. Lihat Taftazani (ed) *Aspek Internasional dari Kebijakan Non Penal dalam Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002 h. 182.

Padahal kalau diperhatikan kejahatan dan sanksi/hukum pidana itu berubah, sebagaimana dikatakan Sudarto<sup>73</sup>.

Sejarah menunjukkan bahwa apa yang dinamakan kejahatan itu berubah, demikian pula apa yang dinamakan pidana. Jadi kalau orang mengira bahwa orang yang melakukan pencurian harus dipidana penjara, karena hal itu sudah dipandang “memang begitu”, maka perkiraan orang itu tidak benar! Ini adalah masalah penegakan hukum. Adapun cara bagaimana hukum itu ditegakan, itu merupakan masalah pemilihan sarana apa yang dipandang paling efektif dan bermanfaat untuk mencapai tujuan.

Selama ini tujuan yang ingin dicapai dengan sanksi/hukum pidana tidak pernah dirumuskan secara formal dalam perundang-undangan, baik dalam KUHP maupun di luar KUHP. Tujuan ini baru nampak dalam konsep Rancangan KUHP (baru) 1971/1972 sampai konsep 2004/2005.<sup>74</sup> Bertolak dari pemikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*purposive system*) dan pidana hanya merupakan alat/sarana mencapai tujuan, maka konsep

---

<sup>73</sup> Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan kedua Alumni Bandung. 1986. h. 106.

<sup>74</sup> Pasal 51 RUU KUHP 2004/2005 menyebutkan (1) pemidanaan bertujuan a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembiaian sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana. (2) pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

merumuskan tujuan pemidanaan yang bertolak pada keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan individu”.

Selain masalah tujuan pemidanaan, hal lain yang perlu diperhatikan dalam kebijakan legislatif adalah mengenai pedoman pemidanaan yang juga tidak diatur dalam perundang-undangan selama ini. Diadakannya pedoman untuk menerapkan sistem perumusan ancaman pidana, antara lain dimaksudkan untuk memberikan sifat fleksibilitas dalam rangka menghindari sifat kaku/absolut/imperatif dari suatu sistem perumusan ancaman pidana. Dengan adanya pedoman (pemidanaan) maka dimungkinkan:<sup>75</sup> (1) suatu sistem perumusan tunggal seolah-olah menjadi sistem alternatif atau sistem kumulatif, (2) suatu sistem alternatif seolah-olah menjadi sistem kumulatif. Diadakannya pedoman juga dimaksudkan sebagai jembatan untuk menginformasikan prinsip-prinsip atau ide-ide mengenai (1) prinsip subsidiaritas di dalam memilih jenis sanksi pidana, (2) ide individualisasi pidana, (3) ide untuk mengefektifkan jenis pidana yang bersifat non-custodial atau mengefektifkan jenis alternatif pidana selain pidana perampasan kemerdekaan dalam rangka menghindari/membatasi penggunaan pidana penjara (kebijakan selektif dan

---

<sup>75</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai.....*Op. Cit.* h. 118-119

limitatif). Mengenai keberhasilan sanksi alternatif ini, Simon A.M.

memberikan pedoman sebagai berikut:<sup>76</sup>

*The alternative sanction should be suitable to replace the custodial sentence, the alternative must also be acceptable as punishment, and there should be some certainty that the alternative sanction will indeed replace the custodial sentence to be imposed. (4)*

ide untuk mengefektifkan penggabungan jenis sanksi yang bersifat pidana (*straf/punishment*) dengan jenis sanksi yang lebih bersifat tindakan (*maatregel/treatment*) walaupun disadari adanya kekaburan mengenai batas-batas kedua jenis sanksi tersebut; (5) ide untuk menghindari eksekusi dari pidana pendek.

Dalam rancangan KUHP Baru pedoman pemidanaan dirumuskan bermacam-macam, yaitu : (1) ada pedoman yang bersifat umum untuk memberi pengarahannya kepada hakim mengenai hal-hal apa yang sepatutnya dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana, (2) ada pedoman yang bersifat khusus untuk memberi pengarahannya kepada hakim dalam memilih atau menjatuhkan jenis-jenis pidana tertentu, (3) ada pedoman bagi

---

<sup>76</sup> Dijk. Jan van (ed) *Alternatives to Custodial Sentences dalam Criminal Law in Action An Overview of Current Issues in Western Societies*, Kluwer and Taxation Publisher, Norwell, USA, 1988. P. 288. Jenis-jenis sanksi/tindakan non custodial dalam Resolusi PBB 45/110 tertanggal 14 Desember 1990, yang merupakan hasil kongres PBB ke-8 mengenai *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* yang diselenggarakan di Havana Cuba pada tanggal 27 Agustus – 7 September 1990, adalah : a. sanksi-sanksi lisan (**verbal sanction**) seperti *admonition* (teguran/nasihat baik), *reprimand* (teguran keras/penceraan), dan *warning* (peringatan). b. pembebasan/pelepasan bersyarat (*conditional discharge*), c. pidana yang berhubungan dengan status (*status penalties*), d. sanksi ekonomi (economic sanctions) dan pidana yang bersifat uang (*monetary penalties*). Seperti denda dan denda harian (e) perampasan (confiscation) atau perintah pengambilalihan (*expropriation order*), (f) ganti rugi (*restitution*) kepada korban atau perintah kompensasi, (g) pidana bersyarat/tertunda (*suspended/deferred sentence*), (h) pengawasan (*probation and judicial supervision*), (i) pidana/perintah kerja sosial (*a community service order*).

hakim dalam menerapkan sistem perumusan ancaman pidana yang digunakan dalam perumusan delik.

Pencantuman tujuan dan pedoman pemidanaan dalam perundang-undangan sangat penting dalam rangka mewujudkan ide dasar dari pidana penjara yang ingin dikembangkan di Indonesia, yaitu dengan sistem pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan mengandung arti adanya tujuan, sistem proses, dan metode untuk pelaksanaan pidana penjara di Indonesia,<sup>77</sup> sehingga akan dapat mewujudkan ide pemasyarakatan yaitu ide rehabilitasi dan resosialisasi. Simpulan sementara bahwa Kebijakan perumusan sanksi pidana penjara dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini belum mewujudkan atau menunjang tujuan dari ide pemasyarakatan yaitu ide rehabilitasi dan resosialisasi. Dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini belum nampak adanya kebijakan selektif dan limitatif, baik yang berupa penghematan dan pembatasan pidana penjara yang dirumuskan /diancamkan dalam undang-undang, tetapi juga kebijakan yang memberikan peluang bagi hakim untuk menerapkan pidana penjara itu secara selektif dan limitatif.

Kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh mengenai pidana penjara dalam rangka mewujudkan ide pemasyarakatan adalah

---

<sup>77</sup> Bambang Poernomo, *Op Cit* h. 142.

(1) membatasi perumusan pidana penjara secara imperatif, terutama perumusan secara tunggal, (2) adanya ketentuan perundang-undangan sebagai katub pengaman (*veiligheidsklep*) yang memberi pedoman dan kewenangan kepada hakim untuk menghindari, membatasi atau memperlunak penerapan sanksi pidana penjara yang dirumuskan secara imperatif, (3) adanya ketentuan lebih lanjut mengenai pidana bersyarat, sehingga dapat mengurangi sifat kaku dari sistem perumusan pidana penjara secara imperatif. (4) pengaturan pedoman penjatuhan pidana penjara yang dirumuskan secara eksplisit dalam perundang-undangan terutama untuk perundang-undangan di luar KUHP, yang mengadakan penyimpangan terhadap sistem yang dianut oleh KUHP. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan sifat fleksibilitas dalam rangka menghindari sifat kaku/absolut/imperatif dari suatu sistem perumusan ancaman pidana. Adanya ketentuan yang memberi kewenangan kepada hakim untuk merubah atau menghentikan sama sekali pelaksanaan putusan pidana.

**Hambatan Pembinaan Narapidana bagi PSH diperlukan kebijakan.** Seperti diketahui bahwa Narapidana sebagai subyek pemasyarakatan adalah pihak yang merasakan pidana penjara. Pandangan yang menyatakan bahwa narapidana dijadikan fakta diterapkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995.

Pengalaman menyeramkan di dalam penjara sebagai sekolah kejahatan (*school of crime*), menjadi bukti bahwa banyak hambatan yang dialami narapidana. Di samping di dalam penjara dijumpai kelompok atau sekte-sekte yang cenderung menimbulkan gesekan bahkan menjadi alat penekan (pemeras) bagi kelompok lain, sehingga bila terjadi perlawanan maka timbullah perkelahian. Hambatan lain adalah sosialisasi petugas lapas dengan seperti perlakuan yang kasar, pilih kasih terlebih dalam penerapan tata terib Lapas petugas mengambil jarak dengan narapidana, sehingga kesan negatif dari dalam kehidupan penjara sebagai sekolah kejahatan tetap berlangsung. Seperti diketahui bahwa selama berada dalam Lapas, narapidana jauh dari keluarga, narapidana adalah orang diasingkan dari lingkungan sosialnya karena itu narapidana mengalami pembatasan-pembatasan. Selain itu dari segi sarana prasarana Lapas yang kurang memadai seperti tidak memiliki kamar mandi yang baik, peralatan makan yang baik, dan tempat pelatihan kerja atau pelatihan ketrampilan adalah bagian dari hambatan pembinaan. Apalagi ditambah dengan hubungan sosial yang tidak sehat yang terbina antara petugas dengan narapidana. Secara khusus tentang sarana prasarana dapat diungkap bahwa keberhasilan konsep pemasyarakatan tidak terlepas dari sarana yang tersedia.



Tahap Pembinaan Narapidana PSH. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) dinyatakan bahwa Tahap Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu (a) tahap awal, (b) tahap lanjutan, dan (c) tahap akhir.

Di dalam Pasal 9 ayat (1) dijelaskan bahwa Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bagi Narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan sepertiga dari masa pidana. Sementara itu menurut Pasal 9 ayat (2) "Tahap lanjutan" sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi : Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan seperdua dari masa pidana, dan Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan dua pertiga masa pidana.

Di dalam Pasal 9 ayat (3) dijelaskan bahwa tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan. Berkaitan dengan pembinaan narapidana, maka di dalam Pasal

10 ditentukan mengenai pokok kegiatan pembinaan yang mesti dilakukan pada ketiga tahapan pokok pembinaan, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Pembinaan tahap awal meliputi pokok kegiatan sebagai berikut : Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan ditentukan paling lama 1 (satu) bulan; Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;

a) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal. Pembinaan tahap lanjutan meliputi pokok kegiatan sebagai berikut : a) perencanaan program pembinaan lanjutan; b) pelaksanaan program pembinaan lanjutan; c) penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan dan; d) perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi. Pembinaan tahap akhir meliputi pokok kegiatan sebagai berikut : a) perencanaan program integrasi; b) pelaksanaan program integrasi; c) pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir. Perlu ditegaskan bahwa menurut Pasal 11 pembinaan tahap awal dan lanjutan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), sedangkan tahap akhir dilaksanakan di luar LAPAS oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan (terutama narapidana),

dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar narapidana setelah selesai pidananya, pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Pembinaan kesadaran beragama Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan yang salah. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, agar narapidana menjadi warga Negara yang baik yang dapat berbakti kepada Negara dan bangsanya. Perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan Negara adalah sebagian dari iman.

Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan). Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir narapidana semakin meningkat yang diperlukan untuk menunjang kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan model ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non-formal. Pendidikan formal diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pendidikan non-formal yang paling mudah dan murah ialah kegiatan ceramah umum kesempatan memperoleh informasi dari luar, baca Koran, non televisi dengan radio.

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajiban mereka dalam rangka turut menegakan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga Negara Indonesia yang taat kepada hukum. Metode pendekatan yang diutamakan ialah metoda persuasif, edukatif, komunikasi dan akomodatif (metode PEKA). Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Pembinaan di bidang ini dapat dinyatakan sebagai pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Untuk mencapai ini, kepada narapidana selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong-royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat dan lingkungannya. Pembinaan kemandirian untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misal kerajinan tangan, industri rumah tangga, rekreasi, mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.

Ketrampilan untuk mendukung usaha industri kecil misal pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan bahan jadi (seperti rotan menjadi perabot rumahtangga, pengelolaan makanan ringan berikut pengawetannya dan pembuatan batu bata, genteng, batako).

Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu, misal memiliki kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi misalnya industri kulit, industri sepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak atsiri dan usaha tambak udang. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan menyatakan bahwa Tahap Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu (a) tahap awal, (b) tahap lanjutan, dan (c) tahap akhir.

Di dalam Pasal 9 ayat (1) dijelaskan bahwa Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf

a bagi Narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan sepertiga dari masa pidana. Sementara itu menurut Pasal 9 ayat (2) "Tahap lanjutan" sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi : Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan seperdua dari masa pidana, dan Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan dua pertiga masa pidana. Di dalam Pasal 9 ayat (3) dijelaskan bahwa tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan. Berkaitan dengan pembinaan narapidana, maka di dalam Pasal 10 ditentukan mengenai pokok kegiatan pembinaan yang mesti dilakukan pada ketiga tahapan pokok pembinaan, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Pembinaan tahap awal meliputi pokok kegiatan sebagai berikut : Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu bulan; Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal. Pembinaan tahap lanjutan meliputi pokok kegiatan sebagai berikut : Perencanaan program pembinaan lanjutan;

Pelaksanaan program pembinaan lanjutan; Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan dan; Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi. Pembinaan tahap akhir meliputi pokok kegiatan sebagai berikut : Perencanaan program integrasi; Pelaksanaan program integrasi; Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir. Perlu ditegaskan bahwa menurut Pasal 11 pembinaan tahap awal dan lanjutan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), sedangkan tahap akhir dilaksanakan di luar LAPAS oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Berdasarkan pentahapan pembinaan umum narapidana tersebut di atas, maka dalam pembinaan narapidana narapidana seumur hidup pada LAPAS Klas IIA Palu juga dikenal beberapa tahapan pembinaan.

Tahapan awal, atau disebut secara praktisnya tahapan *maximum security* atau tahapan admisi atau orientasi (*the oriented phase*). Dalam tahapan ini mulai lagi narapidana narapidana seumur hidup yang masuk lagi di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas IIA Palu, akan diperkenalkan dengan lingkungan sekitarnya. Tujuan pembinaannya ialah agar narapidana dapat mengenal cara hidup, peraturan, dan tujuan dari pembinaan atas dirinya, termasuk sebab-sebab melakukan kejahatan dan keterangan yang menyangkut latar belakang

sosialnya, meskipun pada masa menjalankan pidananya yang pertama hal itu sudah pernah dijalannya.

Setelah dilakukan masa orientasi, yaitu sejak diterima sampai sekurang-kurangnya sepertiga dari masa pidananya, kemudian diadakan evaluasi oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan. Sehingga dalam tahap berikutnya narapidana dapat diberikan pembinaan sesuai dengan hasil evaluasi itu. Misal disesuaikan dengan minat dan bakat untuk menopang hidup setelah narapidana bersangkutan selesai menjalani masa pidananya.

Pada masa orientasi ini tingkat pengawasan narpidana bersifat pengawasan maksimum (*maximum security*). Tujuan pengawasan ini mencegah munculnya kejadian yang tidak diinginkan misal pelarian. Tahap *Medium Security* (Tahap Pembinaan) Pada tahapan ini merupakan masa pembinaan pemula yang diberikan kepada narapidana yang telah menjalani masa pidana di atas sepertiga sampai sekurang-kurangnya setengah dari masa pidana sebenarnya. Tingkat pengawasan sudah menurun menjadi pengawasan sedang (*medium security*). Maksudnya dikurangi pengawasan untuk memberi rasa percaya pada diri narapidana. Tahap Asimilasi (*Minimum Security*) Pada tahapan ini pembinaan lanjutan diberikan kepada narapidana yang telah menjalani setengah sampai dua



pertiga masa pidananya. Narapidana yang bersangkutan telah diperbolehkan menyesuaikan diri dengan masyarakat di luar, berolahraga, bekerja di luar tembok lembaga. Akan tetapi pelaksanaannya tetap dalam pengawasan petugas lembaga pemasyarakatan. Tingkat pengawasan menurun menjadi minimum security. Maksud dari kegiatan dilakukan di luar lembaga adalah mempersiapkan narapidana agar dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya sehingga tidak menjadi canggung ketika kembali bergaul dalam masyarakat. Tahap Integrasi Pada tahapan ini merupakan tahap akhir bagi narapidana yang telah menjadi dua pertiga sampai selesai masa pidananya. Kepada narapidana dapat diberikan bebas bersyarat atau cuti menjelang bebas. Akan tetapi pengawasan tetap dilaksanakan sampai narapidana yang bersangkutan benar-benar bebas atau selesai menjalani masa pidananya. Seseorang narapidana yang memperoleh bebas bersyarat atau cuti menjelang bebas, tidak lagi memperoleh pembinaan dari petugas lembaga pemasyarakatan, melainkan memperoleh bimbingan dari petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang selanjutnya disebut Pembimbing Kemasyarakatan (PK).

Pembinaan Umum. Jenis pembinaan terhadap narapidana narapidana seumur hidup yang juga disebut sebagai warga

binaan pemasyarakatan secara nasional masih menggunakan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Berdasarkan SK tersebut, maka bentuk pembinaan yang dilakukan pada LAPAS Klas IIA Palu meliputi enam pokok kegiatan pembinaan berikut ini.

### **1. Penyuluhan Hukum**

Penyuluhan hukum diberikan untuk membentuk perilaku narapidana memiliki kesadaran hukum dan taat kepada hukum selama berada dalam lingkungan pembinaan maupun setelah kembali dalam masyarakat.

Kegiatan penyuluhan hukum diselenggarakan berhadapan langsung dengan penyuluh dalam bentuk Temu Sadar Hukum dan Sambung Rasa, melalui ceramah, diskusi, serasehan, temu wicara, peragaan dan simulasi hukum. Untuk keperluan ini Kepala LAPAS melakukan kerjasama dengan instansi penegak hukum dan pemerintah setempat. Pelaksanaan diawasi oleh Petugas LAPAS yang ditunjuk, dan pokok-pokok materi penyuluhan sepengetahuan Kepala LAPAS sebagai penanggungjawab LAPAS.

### **2. Penyuluhan Rohani**

Kegiatan dalam penyuluhan ini meliputi pendidikan agama dan pendidikan umum. Pelaksanaannya dapat dilakukan oleh petugas LAPAS sendiri atau bekerjasama dengan instansi lain dan tokoh agama atau oleh narapidana. Pelaksanaannya diawasi oleh petugas LAPAS yang ditunjuk, agar tidak digunakan untuk tujuan yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban LAPAS. Pokok materi mesti diketahui Kepala LAPAS, dan diupayakan tidak menyinggung perasaan atau keresahan sesama narapidana.

### **3. Pembinaan Kemampuan Intelektual**

Pembinaan model ini perlu dilakukan agar pengetahuan dan kemampuan berpikir para narapidana meningkat, sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pendidikan nonformal yang pernah dilakukan adalah melakukan ceramah dan diberi kesempatan untuk menonton televisi, membaca majalah atau Koran dan buku-buku lain, bekerjasama dengan Perpustakaan Wilayah, serta hiburan lain yang diatur oleh Petugas LAPAS.

### **4. Penyuluhan Jasmani**

Agar kesehatan jasmani narapidana tetap terjaga dengan baik, kepada narapidana diberikan kegiatan olahraga dan rekreasi sesuai fasilitas yang tersedia pada LAPAS Klas IIA

Palu. Kegiatan di luar LAPAS didampingi petugas LAPAS. Kesempatan seperti ini hanya diberikan kepada Narapidana yang telah menjalani masa pidananya pada tahapan pembinaan ketiga dan keempat (minimum security, asimilasi, dan integrasi).

#### **5. Bimbingan Bakat dan Ketrampilan**

Sejak tahap pertama (admisi atau orientasi), narapidana diberi kesempatan . Setelah bakat yang dimiliki narapidana diketahui, kemudian diarahkan untuk mengembangkan bakat tersebut, sesuai dengan fasilitas yang tersedia di dalam LAPAS dengan pengawasan langsung petugas LAPAS.

#### **6. Pembinaan Perpustakaan**

Untuk menyalurkan minat baca narapidana, pihak LAPAS menyediakan buku-buku di perpustakaan antara lain buku agama, pengetahuan umum, kejuruan, dan buku lain yang dipandang bermanfaat bagi narapidana.

#### **7. Pembinaan Khusus**

Selain pembinaan secara umum yang meliputi keenam pokok kegiatan tersebut di atas, maka narapidana narapidana seumur hidup memperoleh pembinaan khusus yang berbeda dengan narapidana pidana pada umumnya. Pembinaan khusus ini terjadi pada tiga tahapan pembinaan, yakni tahap maximum security, medium security dan

minimum security. Berdasarkan ketiga tahapan utama pembinaan tersebut, kemudian diinventarisir empat bentuk pembinaan khusus terhadap narapidana narapidana seumur hidup yang secara praktis dilakukan pada LAPAS Klas II a Palu. Keempat bentuk pembinaan tersebut diwujudkan dalam bentuk perlakuan kepada narapidana narapidana seumur hidup. Bentuk perlakuan dimaksud adalah (1) pengawasan khusus, (2) perihal pemberian remisi, (3) penundaan asimilasi, dan (4) pemisahan blok napi.

### **1. Pengawasan khusus**

Pengawasan khusus dimaksudkan di sini ialah narapidana narapidana seumur hidup sejak registernya, diperlukan syarat-syarat ekstra ketat dalam pengamanannya. Persyaratan diatur, baik terhadap petugas LAPAS maupun narapidananya sendiri. Terhadap narapidana diberlakukan aturan disiplin yang berbeda dengan narapidana biasa, begitu pula dengan petugas diberi beban atau bobot kerja ganda.

### **2. Pemberian Remisi**

Remisi merupakan salah satu dari hak narapidana. Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 menyebutkan bahwa setiap narapidana dan anak didik pemsarakatan selama menjalani masa pidana

berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi. Maksud berkelakuan baik menurut penjelasan pasal ini adalah mentaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan tindakan disiplin yang dicatat dalam buku register F selama kurun waktu yang diperhitungkan dengan pemberian remisi. Pasal 34 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah ini menjelaskan bahwa remisi dapat ditambah, apabila selama menjalani masa pidana yang bersangkutan berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara, atau kemanusiaan, dan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS. Berbuat jasa kepada negara ialah menghasilkan karya ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna bagi pembangunan kemanusiaan. Mencegah pelarian tahanan, narapidana, dan anak didik pemsarakatan.

Perbuatan yang bermanfaat kepada negara atau kemanusiaan antara lain ikut menanggulangi bencana alam, menjadi donor darah atau donor organ tubuh dan telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS seperti ditunjuk sebagai pemuka kerja oleh Kepala LAPAS.

KEPPRES Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi mengatur dua jenis Remisi, yaitu:

- a. Remisi umum, yaitu remisi yang diberikan kepada narapidana pada hari Proklamasi Republik Indonesia setiap Tanggal 17 Agustus;
- b. Remisi khusus. Dimaksud dengan remisi khusus yaitu remisi yang diberikan kepada narapidana pada hari-hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana, dengan ketentuan jika suatu agama dari narapidana tersebut mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, agama yang dipilih ialah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama bersangkutan. Sesuai Pasal 4 ayat (2) KEPPRES 174 Tahun 1999.

### **3. Penundaan Asimilasi**

Asimilasi adalah salah satu bagian penting dari pemasyarakatan narapidana. Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01.PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas menyatakan bahwa asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan

di dalam kehidupan masyarakat. Asimilasi berbeda dengan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas serta berbeda pula dengan pengawasan.

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar lembaga pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP serta Pasal 14, 22, dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan bagi narapidana yang menjalani masa pidana atau sisa masa pidana yang pendek. Sedangkan pengawasan adalah langkah atau kegiatan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas, termasuk di dalamnya kegiatan evaluasi dan pelaporan.

Tujuan dari asimilasi adalah (1) membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan anak didik pemasyarakatan kearah pencapaian tujuan pembinaan, (2) memberi kesempatan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk pendudukan dan ketrampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri ditengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana, (3)



mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

Untuk pelaksanaan asimilasi, maka narapidana harus memenuhi syarat-syarat substantif dan administratif. Persyaratan substantif yang harus dipenuhi ialah :

- a. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
- b. telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
- c. berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
- d. masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana yang bersangkutan;
- e. selama menjalani pidana, narapidana tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;
- f. masa pidana yang telah dijalani khusus untuk asimilasi narapidana telah menjalani setengah dari masa pidana, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sedangkan persyaratan administratif yang harus dipenuhi bagi narapidana dalam tahapan asimilasi adalah :

- a. salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis);
- b. surat keterangan asli dari kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya;
- c. laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana;
- d. salinan (daftar huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala LAPAS;
- e. salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari kepala LAPAS;
- f. surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;

Asmilasi hanya diberikan kepada narapidana yang sudah memenuhi persyaratan baik secara substantif maupun

administratif. Meninjau persyaratan baik yang bersifat administratif maupun substantif seperti dikemukakan di atas, maka bagi narapidana narapidana seumur hidup, akan sukar untuk mendapatkan haknya untuk memperoleh asimilasi. Seperti dalam persyaratan bahwa harus ada surat keterangan asli dari kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya; Di samping itu memperhatikan pula persyaratan yang menyatakan bahwa harus ada salinan (daftar huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala LAPAS.

**Pengasingan (Isolasi) dan Pengamanan** Sering terdengar bahwa pembinaan yang salah atau tidak tepat sasaran menjadikan LAPAS sebagai bagian dari *school crime*. Pengisolasian narapidana narapidana seumur hidup bertujuan untuk dilakukan memisahkan narapidana narapidana seumur hidup dengan narapidana lain. Di samping itu untuk mempermudah pemantauan aktivitas dari narapidana bersangkutan. Beberapa pengalaman di LAPAS Klas II a Palu menunjukkan bahwa narapidana lari keluar LAPAS, akibat dari provokasi yang dibuat oleh narapidana narapidana seumur hidup. Oleh karena itu dipandang

sangat berbahaya apabila tidak dilakukan tindakan pencegahan dalam wujud isolasi.

Kelemahan dari pengisolasian dan perlakuan yang buruk terhadap narapidana seumur hidup dapat memicu gangguan keamanan dalam LAPAS. Seperti diketahui bahwa keamanan dan ketertiban dalam LAPAS merupakan syarat mutlak terlaksananya program-program pembinaan bagi narapidana narapidana seumur hidup maupun narapidana dalam LAPAS pada umumnya. Akan tetapi langkah-langkah pengamanan harus disesuaikan dengan kebutuhan pembinaan. Kebutuhan tersebut adalah mencakup :

- (1) Kegiatan keamanan dan keteriban (Kamtib) LAPAS berfungsi memantau dan mencegah sedini mungkin gangguan kamtib LAPAS.
- (2) Kegiatan kamtib tidak selalu berupa kegiatan fisik;
- (3) Kegiatan kamtib ditujukan agar suasana kehidupan tidak mencekam;
- (4) Menjaga agar tidak terjadi pelarian;
- (5) Memelihara, mengawasi dan menjaga agar suasana kehidupan selalu tertib dan dinamis.

Meninjau kebutuhan kamtib serta untuk menyikapi dalam rangka memenuhi tuntutan berbagai permasalahan

gangguan Kamtib akibat dari ulah narapidana seumur hidup maka harus diambil langkah-langkah yang terpadu, profesional dan managerial.

Manajerial dimaksud bahwa Kalapas adalah sebagai pengambil keputusan semestinya mengambil langkah-langkah yang bijak untuk menanggulangi kamtib akibat narapidana narapidana seumur hidup yang dianggap rawan dengan kamtib LAPAS. Kepala Satuan Pengamanan LAPAS sebagai penyusun rencana program dan penerapan strategi penanggulangan kamtib, disertai dengan pejabat LAPAS lain seperti kepala regu pengamanan (karupam), yang sebetulnya mempunyai peranan strategis dalam rangka :

- (1) menjaga supaya jangan sampai terjadi pelarian (sensitif melahirkan narapidana seumur hidup baru);
- (2) menjaga supaya tidak terjadi kericuhan;
- (3) menjaga tertibnya perikehiduan penghuni LAPAS;
- (4) menjaga utuhnya gedung dan seisinya, terutama setelah tutup kantor.

Tuntutan lain dalam melakukan pembinaan dan perlakuan khusus terhadap narapidana narapidana seumur hidup ialah mengenali lingkungan strategis di dalam dan di luar LAPAS. Secara bertahap membiasakan diri untuk mengenal, memahami dan menguasai perawatan dan penggunaan

persenjataan atau alat-alat pengamanan lainnya serta penguasaan seni bela diri. Sebagai bagian penting dari pembinaan dan perlakuan khusus dari narapidana narapidana seumur hidup ini ialah petugas LAPAS dituntut untuk memahami langkah-langkah preventif dan represif apabila terjadi gangguan kamtib LAPAS. Langkah preventif apabila ada indikasi akan terjadi kerusuhan (kebanyakan dilakukan oleh para narapidana seumur hidup), yaitu :

- (1) melakukan upaya persuasif dan edukatif;
- (2) melakukan upaya kompromi dan musyawarah;
- (3) mengamankan bagian dan fasilitas penting LAPAS;
- (4) mengamankan barang dan dokumen penting;
- (5) menghubungi aparat keamanan, dinas pemadam kebakaran atau instansi lain yang terkait.

Langkah represif diambil apabila telah ada indikasi kerusuhan yang mulai tidak terkendali, yang meliputi

- a) pemukulan lonceng tanda bahaya, alarm secara terus-menerus;
- b) perintah atau arahan yang tegas dan jelas dari KALAPAS atau pejabat yang ada yang bertanggungjawab atas pengamanan LAPAS;

- c) melakukan koordinasi penanganan gangguan kamtib dengan aparat keamanan, dinas pemadaman kebakaran dan instansi terkait lainnya;
- d) menempati posisi atau titik siaga yang telah ditentukan;
- e) memecah kekuatan massa narapidana yang pro dan kontra dengan kerusuhan;
- f) memperkecil dan mempersempit kekuatan dan ruang gerak narapidana yang pro kerusuhan;
- g) memberi tembakan peringatan, gas air mata dan peluru hampa atau peluru karet;
- h) apabila ada yang telah membahayakan jiwa petugas, secara terukur dapat memberi tembakan melumpuhkan (dengan peluru tabur/tajam).

Bila disimak mengenai beberapa faktor yang berkaitan dengan pembinaan narapidana seumur hidup, maka seharusnya dipahami oleh para petugas LAPAS selaku pembina. Faktor tersebut secara tak langsung mendorong terjadi narapidana seumur hidup, yang mencakup : (a) ketidakpuasan dan merasa diperlakukan tidak adil dalam proses penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan; derita dan dendam atas penyiksaan fisik dan psikis selama proses pengadilan; ketidakpuasan dan dendam terhadap perlakuan aparat penegak hukum,

termasuk petugas LAPAS atau Rutan; dendam terhadap lawan perkaranya; (b) kerinduan, kecemasan, ketakutan dan kecemburuan kepada keluarga yang ditinggalkan, termasuk kebutuhan biologis. Terlibat hutang, di dalam maupun di luar LAPAS; Ingin menjadi pahlawan di lingkungan narapidana; (c) Kejengkelan, kecemasan dan ketakutan kepada sesama narapidana, karena pemerasan, perkosaan, perkelahian dan ancaman antar sesama narapidana. (d) Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai institusi yang diberi wewenang untuk menjalankan peradilan pidana tahapan purna ajudikasi (*post-adjudication phase*).

Dari pembahasan sebelumnya telah diungkap upaya-upaya yang dilakukan oleh LAPAS dalam pembinaan narapidana umum maupun narapidana residivis dengan berbagai kendala yang dihadapi (sarana prasarana, dan keberadaan hakim wasmat). Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas LAPAS bisa disimpulkan bahwa pembinaan narapidana kejahatan konvensional yang menjalani pidana penjara seumur hidup tak ada jaminan tingkat reintegrasinya untuk bisa kembali menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna. (e) Sebaliknya bila diterapkan pidana jangka pendek maka bisa saja terus-menerus terjadi residivis



(umum maupun khusus), karena memang masa pembinaan narapidana yang begitu pendek.

Pembinaan narapidana selain dimungkinkan oleh kelengkapan sarana prasarana dan keaktifan hakim wasmat, juga keterlibatan narapidana pada semua fase pembinaan (fase awal, fase lanjutan, dan fase akhir). Dengan masa pidana yang pendek, kemudian pemberian hak remisi dan pengurangan masa tahanan, maka sukar untuk seorang narapidana memperoleh pembinaan intensif untuk mempersiapkannya menjadi warga masyarakat (perwujudan konsep rehabilitasi dan resosialisasi). (f) Pembinaan terhadap narapidana PSH pun terkendala dengan masa pidana, meskipun sudah dilakukan pembinaan khusus, namun karena masa pidana yang pendek/singkat, maka seseorang narapidana tidak sempat mengikuti semua fase pembinaan dengan baik. Selain itu seorang narapidana PSH seakan sudah terbiasa dengan situasi dan kondisi kehidupan pemasyarakatan, dan selalu ada kecenderungan untuk mengulangi tindak pidana. Pengulangan demikian karena tidak mengabdikan pada konsepsi penjaraan dalam *vergelding theorien* (teori pembalasan), penyesalan dan tak tumbuh kesadaran untuk memperbaiki kehidupan pribadi, hal ini juga dipengaruhi oleh bobot pengenaan pidana penjara seumur

hidup oleh hakim sehingga seakan menghilangkan masa pembinaan di dalam LAPAS.

Ketiadaan harapan untuk kembali ke masyarakat, dengan demikian tidak perlu sebetulnya mencapai sasaran penjeraan, karena narapidana seumur hidup tinggal hanya menunggu kapan harus berakhir masa hidupnya, maka sukar diharapkan bagi penerapan pidana penjara seumur hidup dapat berfungsi sebagai sarana deterensi sebagaimana dimaksud dalam teori tujuan pemidanaan (*doel theorien*).

Oleh karena itu bila kita kembali pada penelusuran teoretis konsepsional sebagai landasannya, maka paling tidak ada 3 (tiga) hal penting yang patut diungkap melalui berkaitan dengan ditetapkannya suatu sanksi sebagai sanksi pidana penjara seumur hidup, yakni (1) penelusuran **ide dasar** ditetapkan sanksi pidana penjara seumur hidup, (2) deskripsi **kebijakan hukum pidana** dalam penetapan sanksi pidana penjara seumur hidup, dan (3) keterkaitan penetapan sanksi pidana penjara seumur hidup dengan **pembaharuan hukum pidana** di Indonesia.

Penelusuran Ide Dasar Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup. Ide dasar atau konsepsi dasar adalah merupakan nilai-nilai atau pandangan yang melatarbelakangi

ditetapkannya sanksi pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup adalah bagian dari pidana perampasan (pencabutan) kemerdekaan yang sudah ditentukan waktunya (*definite period of time*). Oleh karena pidana seumur hidup merupakan bagian dari pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara, maka perlu didefinisikan dengan jelas tentang maksud dari pidana penjara. Menurut Tongat Pidana Penjara sebagai pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata-tertib bagi mereka yang telah melanggar.<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief dalam Tongat menegaskan bahwa dilihat dari sudut penjatuhan pidana dan juga dari sudut terpidana, pidana seumur hidup itu bersifat pasti (*definite sentences*) karena siterpidana dikenakan jangka waktu yang pasti.<sup>4</sup> Disebabkan sifatnya yang pasti itu, Roeslan Saleh dalam Tongat<sup>5</sup> menyatakan bahwa orang menjadi keberatan terhadap pidana seumur hidup. sebab dengan putusan yang demikian, terpidana tidak akan mempunyai harapan lagi kembali

---

<sup>3</sup> Tongat, *Pidana Seumur Hidup, Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2004. h. 35.

<sup>4</sup> *Ibid.* h. 37.

<sup>5</sup> *Ibid.*

kedalam masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief<sup>6</sup> masalah pidana penjara seumur hidup dapat dikategorikan atas beberapa hal antara lain : Tingkat pencelaan masyarakat yang tinggi terhadap suatu tindak pidana tidak hanya dapat ditunjukkan dengan ancaman pidana seumur hidup, tetapi juga dapat dengan menetapkan maksimum pidana penjara yang cukup tinggi dalam waktu tertentu (antara 25-40 tahun). Pidana penjara seumur hidup kurang sesuai dengan tujuan filsafat sistem pemasyarakatan, karena pada hakekatnya perampasan kemerdekaan seseorang itu seharusnya hanya bersifat sementara (untuk waktu yang tertentu) sebagai sarana untuk memulihkan integritas terpidana agar mampu mengadakan readaptasi sosial. Pidana penjara seumur hidup hanya dapat diterima secara eksepsional, sekedar untuk ciri simbolik akan sangat tercelanya perbuatan yang bersangkutan dan sebagai tanda peringatan bahwa yang bersangkutan dapat dikenakan maksimum pidana penjara dalam waktu tertentu yang cukup lama; jadi tidak untuk benar-benar diterapkan secara harafiah; sehubungan dengan kesimpulan diatas maka dalam aturan umum Buku I dapat dirumuskan maksimum umum untuk delik-delik yang diancam dengan pidana penjara seumur

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti Bandung. 1986. h. 217

hidup. Disamping itu perlu ditetapkan pula pidana minimum umum untuk delik-delik yang diancam dengan pidana seumur hidup itu dengan disertai klausul yang memberi kemungkinan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana di bawah minimum umum tersebut. pidana penjara seumur hidup hendaknya selalu dirumuskan sebagai alternatif dari pidana mati atau selalu dialternatifkan dengan pidana penjara dalam waktu tertentu.

Pandangan **Barda Nawawi Arief** di atas paling tidak mengandung 4 (empat) konsepsi dasar tentang pidana penjara seumur hidup, yakni (1) pidana penjara seumur hidup adalah salah satu jenis sanksi pidana yang kurang sejalan dengan falsafah pembinaan dalam sistem pemasyarakatan yang mengandalkan *pola rehabilitasi* dan *resosialisasi*. (2) pidana penjara seumur hidup bersifat eksepsional (perkecualian) bahkan cenderung *berkarakter simbolik*, (3) oleh karena itu untuk delik yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup harus disertai dengan pertimbangan dan pedoman pemidanaan (*sentencing guide*) yang tepat., (4) pidana penjara seumur hidup adalah pidana yang selalu dialternatifkan dengan pidana penjara waktu tertentu atau pidana mati. Ide dasar pemberlakuan sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup terkait pula dengan tujuan

pidana (tujuan penjatuhan pidana). Pada dasarnya ada 3 (tiga) teori tujuan pidana, yakni teori retributive, teori teleologis, dan teori retributivisme teleologis. Pandangan/teori retributive ini merupakan pandangan atau teori yang dianggap paling klasik mengenai konsepsi pidana. dalam pandangan ini, diadakan, bahwa setiap individu manusia itu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Menurut pandangan ini seorang pelaku tindakan pidana mutlak harus di pidana. semboyan yang sangat populer dalam era ini adalah darah ganti darah (*blood to blood*), mati diganti dengan mati (*eyes to eyes*) nyawa ganti nyawa. berdasarkan semboyan yang demikian itulah muncul kemudian pendapat yang menyatakan, bahwa *teori retributive* atau teori pebalasan dalam pidana merupakan *a relic of barbarism*. Bagi penganut pandangan ini maka pidana atas perbuatan yang salah adalah adil, karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh kejahatan. pidana, menurut pandangan ini mengandung nilai moral, yang bebas dari akibat lain yang diharapkan lebih lanjut. Berbeda dengan *teori retributif* yang menekankan pada pentingnya pidana sebagai pembalasan, akan tetapi menurut *Teori Teleologis* pidana digunakan sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai kemanfaatan. baik

yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia. Dengan demikian, menurut teori ini pidana dimaksudkan sebagai alat pencegahan baik yang bersifat khusus (*special prevention*) maupun yang bersifat umum (*general prevention*) teorikedua ini melihat *punishment* sebagai cara untuk mencegah atau mengurangi kejahatan. Premisnya adalah bahwa pemidanaan sebagai tindakan yang menyebabkan derita bagi terpidana, hanya dianggap sah apabila terbukti bahwa dijatuhkannya pidana itu memang menimbulkan akibat lebih baik dari pada tidak dijatuhkannya pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat. karena titik tekan teori ini pada aspek kemanfaatan (*utilitas*) yaitu untuk memperbaiki pelaku dan mencegah orang lain melakukan kejahatan, oleh pakar yang lain teori ini disebut sebagai teori/pandangan *utilitarian prevention*. Menurut aliran ini sistem pemidanaan bersifat plural, karena menghubungkan prinsip-prinsip teleologis, misalnya utilitarianism, dan prinsip-prinsip retributivism dalam satu kesatuan, sehingga sering disebut aliran integratif. bertolak dari prinsip utilitarian dan teleologis pandangan ini menganjurkan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan fungsi pidana sekaligus baik yang bersifat retribution maupun yang bersifat utilitarian

misalnya pencegahan dan rehabilitasi satu hal yang patut dicatat berkaitan dengan perkembangan teori pidanaanaan tersebut adalah adanya pergeseran orientasi pidanaanaan dari prinsip menghukum (*punishment for punishment*) yang cenderung mengabaikan aspek hak asasi manusia kearah gagasan/ide pembinaan (*treatment, maatregelen*) yang lebih menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.berkaitan dengan masalah tujuan pidanaanaan ini, sependapat dengan **Muladi** yang pada intinya menyatakan, bahwa dalam konteks Indonesia maka teori pidanaanaan yang cocok digunakan dalam sistim hukum pidana indonesia adalahkombinasi tujuan pidanaanaan yang didasarkan pada aspek sosiologis, idiologis dan yuridis filosofis masyarakat indonesia sendiri.teori pidanaanaan ini disebut sebagai teori pidanaanaan yang integratif (kemanusiaan dalam sistim pancasila).menurut Muladi tujuan pidanaanaan yang demikian didasarkan pada asumsi dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap pengimbangan.untuk mewujudkan tujuan pidanaanaan yang integratif (kemausiaan dalam sistim pancasila) seperangkat tujuan tersebut diatas harus terpenuhi,dengan catatan, bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis.bertolak dari teori yang dikemukakan Muladi dapat dikemukakan,bahwa



dalam konteks indonesia pemenuha salah satu tujuan pembedanaan tidak boleh menghilangkan/mengabaikan tujuan pembedanaan yang lain.

**2 Kebijakan hukum pidana.** Secara gradual dan fundamental, terminologi “kebijakan” berasal dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). terminologi itu dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (Dalam artian luas termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dengan suatu tujuan (Umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (Warga Negara). Dari kedua terminologi diatas, maka “Kebijakan Hukum Pidana” *Pardant* istilah “Politik Hukum Pidana”. Lazimnya, istilah “Politik hukum pidana” juga disebut dengan istilah *Penal policy*, *Criminal Law Policy* atau *strafrechtpolitiek*. Menurut Sudarto, politik hukum adalah : Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. Kebijakan dari satu negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang

dikehendaki dan diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dengan tujuan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Sedangkan menurut A.Mulder, dalam *strafrechtspolitik* ditentukan garis-garis kebijakan tentang ; Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diperbaiki. Apa yang dapat dipebuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Cara bagaimana penyidikan, pengusutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan. Berdasarkan dimensi diatas,kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan “usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*)”. Konsekuensi logisnya, kebijakan hukum pidana identik dengan penal reform dalam arti sempit.sebab,sebagai suatu sistem hukum pidana terdiri dari budaya (*cultural*), struktur (*structural*) dan substansi (*substansive*) hukum. Oleh karena undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum, maka pembaharuan hukum pidana, disamping memperbaharui perundang-undangan, juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana. Dikaji dari perspektif politik hukum, pada dasarnya politik hukum pidana berusaha

membuat dan merumuskan perundang-undangan pidana yang baik. Menurut Marc Ancel, *Penal Policy* merupakan “ilmu sekaligus seni yang bertujuan memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik.” peraturan hukum positif disini diartikan sebagai peraturan perundang-undangan hukum pidana. Karena itu istilah *penal policy*, menurut Ancel, sama dengan istilah “Kebijakan atau Politik Hukum Pidana “. Usaha dan kebijakan membuat peraturan hukum pidana yang baik, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga bagian dari politik kriminal dengan kata lain, dari sudut politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian “Kebijakan Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

Berdasarkan dimensi di atas, jelaslah bahwa ruang lingkup kebijakan pidana sebenarnya lebih luas dari pada pembaharuan hukum pidana aspek ini berorientasi pada kenyataan bahwa kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap kongkretisasi atau operasionalisasi, fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari : Tahap *fomulasi*, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, tahap ini disebut sebagai

tahap kebijakan legislatif. Tahap *aplikasi*, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampa pengadilan.tahap ini di sebut sebagai tahap kebijakan yudikatif. Tahap *eksekusi*, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana.tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif. Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*Penal Policy, Criminal law policy atau strafrechtspolitik*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Oleh karena itu, diharapkan ketiga tahapan tersebut merupakan satu jalinan mata rantai yang berkorelasi dalam sebuah kebulatan sistem.dengan demikian,kebijakan legislatif adalah tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan proses fungsionalisasi/ operasionalisasi / konkretisasi hukum pidana dan merupakan fundamen tahap aplikasi dan tahap eksekusi.

Bila dikaji lebih luas lagi, maka kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana material, hukum pidana formal dan hukum pelaksana pidana. Pada dasarnya, sebagai kebijakan yang berdiri sendiri untuk menanggulangi kejahatan, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari tujuan kriminal. Menurut

Sudarto, politik kriminal diartikan ke dalam 3 (tiga) pengertian. Sedangkan bagi Hamdan, dalam pengertian praktis, politik kriminal adalah usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Usaha ini meliputi aktivitas dari pembentuk undang-undang, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan aparat eksekusi pemidanaan. Aktivitas badan-badan tersebut tidak berdiri sendiri melainkan berkaitan satu sama lain sesuai fungsinya masing-masing. Selanjutnya, proses penegakan hukum dalam penanggulangan kejahatan melalui kebijakan penal/hukum pidana sangat penting eksistensinya. Aspek ini tersirat melalui seminar Kriminologi ke 3 tahun 1976 dimana disebutkan bahwa: "Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk sosial defence dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan (*rehabilitatie*) dengan memperbaiki atau memulihkan kembali si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari

kebijakan penegakan hukum (*Law inforcement policy*). Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) Pidana pada hakekatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*). Sehingga wajar apabila kejahatan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional ntuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi, dalam pengertian social policy sekaligus tercakup di dalamnya *social welfare policy* dan *social defence policy*.

## **2. Kedudukan Dan Pengaturan Pidana Seumur Hidup Dalam Kajian Perbandingan Di Beberapa Negara**

Masalah pengaturan pidana seumur hidup dalam RUU-KUHP tidak hanya di Indonesia akan tetapi di beberapa negara juga mengatur mengenai hal ini, antara lain sbb :

### **a. Thailand**

Pada prinsipnya terhadap pengaturan pidana penjara seumur hidup dalam hal pemberatan pidana tidak akan pernah dinaikkan sampai pidana mati, akan tetapi hanya sampai pada pidana seumur hidup. Sekalipun demikian terhadap pidana

penjara seumur hidup akan diganti menjadi pidana 50 tahun penjara (pasal 51) KUHP Thailand

Sebagai syarat dalam menjalani pidana atas pidana yang akan diterapkan, akan dikurangi sebagai berikut :

- (1) Jika pengurangan dengan sepertiga, maka pidana akan dikurangi menjadi penjara seumur hidup
- (2) Jika pengurangan dengan setengah, maka pidana akan dikurangi menjadi seumur hidup, atas penjara dari dua puluh tahun sampai 50 tahun (Pasal 52)

Lain halnya dengan di Indonesia pidana penjara seumur hidup boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut – turut, dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memiliki antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu jika grasinya ditolak begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampau, karena perbarengan (Concursus), (Pengulangan), (Residive) atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52 dan 52a (LN 1958 No. 127) atas juga pidana selama waktu tertentu jadi sekali – kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

Ada beberapa hal lain tentang pengenaan sanksi pidana seumur hidup yang juga diterapkan dalam KUHP Thailand khususnya dalam Buku II Delik-delik khusus yang berhubungan

dengan Keamanan Kerajaan antara lain Pasal 107 tentang Perencanaan Pembunuhan Raja atau membuka rahasia negara, dan pasal 108 tentang perbuatan kekerasan atau merampas kemerdekaan Raja dan pasal 240 tentang delik yang berhubungan dengan alat pembayaran. Hal ini jika disimak maka di Indonesia juga dapat dilihat dalam pasal 340 tentang Perencanaan pembunuhan yang ancaman hukumannya pidana mati atas pidana seumur hidup.

#### **b. Korea**

Pengenaan terhadap pidana penjara seumur hidup dapat dilihat dalam delik pemberontakan (pasal 87) yang apabila seseorang yang menciptakan suatu kekacauan dengan maksud untuk merebut wilayah nasional atau menggulingkan konstitusi nasional diancam pidana menurut klasifikasi berikut ini :

1. Pimpinan gerombolan diancam pidana mati, pidana Perampasan kemerdekaan seumur hidup atau penjara seumur hidup
2. Orang yang ikut serta didalam atau memimpin komplotan itu atau terlibat dalam aktivitas yang lain, diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.



Disamping pasal 87 tersebut, pasal 88 KUHP Korea juga tentang pembunuhan yang bertujuan pemberontakan. Sebagaimana seseorang yang membunuh orang lain dengan tujuan merebut wilayah nasional atau menggulingkan konstitusi nasional, diancam pidana mati, atau pidana Perampasan kemerdekaan seumur hidup atau penjara seumur hidup. Sedangkan di Indonesia sendiri hampir ada persamaannya menyangkut pembunuhan, juga diancam sanksi yang sama selain pidana mati maupun pidana seumur hidup. hal ini juga seperti pemberontakan, menggulingkan pemerintahan, perampokan didarat maupun dilaut, juga diancam pidana mati dan atau seumur hidup

### **c. Perancis**

Orang yang dipidana seumur hidup yang diberikan keringanan pengurangan pidana menjadi subyek pembatasan kemerdekaan bergerak sesuai dengan ketentuan Undang – undang kecuali ditentukan lain oleh Penetapan Penghapusan artinya bahwa pidana seumur hidup ini untuk waktu tertentu, akan dikenakan selama tidak kurang dari lima dan tidak lebih dari dua puluh tahun, sedangkan di Indonesia sendiri persamaannya tidak boleh lebih dari dua puluh tahun dan sekurang – kurangnya paling rendah 1 hari. Hal lain juga dalam

KUHP Perancis dinyatakan bahwa pidana Kerja berat seumur hidup dan kerja berat untuk waktu tertentu, tidak akan dikenakan terhadap seseorang yang berumur diatas 60 tahun pada waktu putusan. Sebagai gantinya ialah kurungan tersendiri seumur hidup atau untuk selama waktu tertentu tergantung pada pidana yang diganti.

Terhadap orang yang dijatuhi pidana seumur hidup diatas akan dikurung didalam sebuah Benteng yang terletak diwilayah daratan Kerajaan sebagaimana ditentukan dengan perintah Raja dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan terpidana boleh berhubungan dengan orang – orang di dalam dan diluar lembaga sesuai dengan Peraturan Administrasi yang dikeluarkan dengan Perintah Raja. Sedangkan di Indonesia terhadap terpidana seumur hidup, kebebasan Bergeraknya dibatasi dan Undang – Undang tidak memberikan batasan mengenai umur dalam hal pengenaan sanksi pidana yang jelas walau umur telah berusia 60 tahun dalam melakukan tindak pidana. Undang – Undang tetap memberikan sanksi pidana berat sesuai dengan perbuatan dan tindak pidana yang dilakukan. Dan terhadap orang yang menjalani pidana penjara seumur hidup akan ditentukan sebagai Undang – Undang telah mengaturnya dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dan atau tempat yang telah ditentukan disebuah tempat yang di

Indonesia dikenal dengan Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan dan terpidana dibatasi pergerakannya untuk berhubungan dengan masyarakat luar sebagaimana peraturan LAPAS sampai batas waktu terpidana menjalani asimilasi

#### **d. Filipina**

Secara umum negara Filipina khususnya mengenai pengaturan pidana seumur hidup dalam KUHP tidak mengenal adanya pidana seumur hidup, yang ada hanyalah pidana mati saja, dan terhadap pengurangan atau alternatif dalam menentukan pidana akan menerapkan skala bertingkat seperti dibawah ini :

- a. Pidana mati
- b. Pengasingan tetap (Reclusion Perpetua)
- c. Pengasingan sementara
- d. Prision mayor (penjara berat)
- e. Prision correctional (penjara koreksi)
- f. Arresto mayor (pidana penahanan berat)
- g. Distieero (pidana tidak mendekati obyek tertentu)
- h. Arresto menor (pidana penahanan ringan)
- i. Pengancaman di muka umum
- j. Denda

Terhadap pengasingan tetap pada poin 2 di atas dinyatakan, “Barang siapa yang dipidana dengan salah satu dari pada pidana – pidana tetap diampuni setelah menjalani pidana selama 30 tahun kecuali jika orang tersebut perilakunya yang tidak diampuni” (Pasal 27) KUHP Filipina.

Jadi pada prinsipnya dalam hal pidana mati dapat diubah menjadi pidana Pengasingan Tetap (Reclusion Perpetua) dengan pidana tambahan keringanan atau karena pengampunan mencakup pidana diskualifikasi mutlak secara tetap larangan perdata selama 30 tahun berikut pidana, kecuali jika pidana tambahan tersebut telah diampuni secara jelas dalam pengampunan tersebut. Begitu juga dalam hal pembunuhan orang tua atau saudara sendiri dipidana dengan pidana reclusion perpetua. Jika kita bandingkan dengan di Indonesia maka pengaturannya sangat berbeda dengan KUHP Filipina ini, perbedaannya adalah Indonesia mengenal adanya pidana seumur hidup yang walaupun secara eksplisit tidak diatur dalam pasal 10 KUHP Indonesia akan tetapi secara implisit sudah tercakup dalam pidana penjaranya. Berikut bentuk pidana sebagaimana susunannya dalam pasal 10 KUHP

a. Pidana Pokok, yang terdiri dari :

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara

- 3) Pidana kurungan
  - 4) Pidana denda
  - 5) Pidana Tutupan (Terjemahan BPHN)
- b. Pidana peralihan yang terdiri dari :
- 1) Pencabutan hak – hak tertentu
  - 2) Perampasan barang – barang tertentu
  - 3) Pengumuman putusan hakim.

Terhadap grasi atau pengampunannya diterima maksimum dapat diubah pidananya menjadi pidana jangka waktu tertentu menjadi 20 tahun penjara dan terpidana bisa menikmati hak – hak lainnya untuk mendapatkan remisi hukuman.

### **3. Kedudukan dan Pengaturan PSH dalam Sistem Hukum Nasional yang akan datang**

Kebijakan pengaturan PSH dalam SHPN tidak terlepas dari kebijakan kriminal dan kebijakan penal yang didalamnya memuat salah satu yang penting yaitu kebijakan formulasi atau kebijakan legislatif disamping itu pengaturan PSH dalam SHPN juga tidak terlepas dari spirit atau ide dasar dari cita – cita pembaharuan hukum nasional (Criminal law reform) yang didasarkan atas motif politik, sosiologis, praktis, dan kecenderungan internasional.

Oleh karena itu, memang sejak awal harus ada pembatasan – pembatasan tertentu yang berkaitan dengan (1) syarat apa yang sekiranya tepat terhadap suatu tindak pidana dikenakan PSH (2) apakah ada pembatasan – pembatasan dalam arti sifat restruktif seperti anak, wanita hamil atau orang lanjut usia (manula) tidak boleh dikenakan pidana seumur hidup (3) bagaimana pelaksanaan PSH, apa ada dipikirkan alasan diberlakukan ide modifikasi pidana.

Seperti diketahui bahwa pengaturan PSH dalam SHPN di Indonesia pada waktu yang akan datang memang harus ada kebijakan yang berorientasi ke depan (forward looking) akan tetapi di sisi lain juga harus mempertimbangkan 2 ide dasar antara perlindungan masyarakat (social defiance) dan ide perlindungan individu. Kedua ide dasar ini jelas bermuara pada ide rehabilitasi dan resosialisasi bagi terpidana yang sedang menjalani pidana karena di pidana dengan PSH.

Jika berorientasi pada ide perlindungan masyarakat maka PSH akan menganut aliran absolut yang menentukan bahwa pelaksanaan PSH sebagai pidana yang pasti batas waktunya / berlakunya (in absolute period of time) dengan demikian dipandang mencederai ide perlindungan individu yang berlanjut pada ide rehabilitasi dan resosialisasi terpidana PSH. Artinya bahwa terpidana PSH meski menjalani / mengalami rehabilitasi tapi tertutup harapan untuk kembali berkumpul dengan keluarga atau

kembali menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna karena sepanjang hidupnya berada di lingkungan lembaga kemasyarakatan sebagai warga binaan pemasyarakatan.

Akan tetapi bila diakui bahwa kebijakan penghapusan PSH dalam SHPN menganut ide dasar perlindungan individu secara proporsional maka konsekuensinya adalah akan memberi kesempatan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana kepada narapidana PSH. Konsekuensinya adalah narapidana PSH yang sudah menjalani pidana karena akibat keputusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian keputusan tersebut dengan mengingat perkembangan dan tujuan pemidanaan.

Khusus yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan sebagai salah satu dasar modifikasi pidana pada PSH seperti tergantung dalam rancangan konsep KUHP baru yang menyatakan bahwa, pemidanaan bertujuan untuk (1) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, (2) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, (3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, (4) membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Lebih lanjut dalam Pasal 54 (2) menyatakan bahwa pemidanaan tidak

dimaksudkan untuk menceritakan dan merendahkan martabat manusia dalam hal ini konsep KUHP baru cenderung tidak menganut paham Dehumanisasi.

Berkaitan dengan modifikasi pidana yang diberlakukan terhadap PSH maka studi komparasi (perbandingan) sangat diperlukan, karena dalam studi tersebut diperoleh gambaran tentang bagaimana PSH diberlakukan oleh masyarakat internasional, bahwa secara skematis komparasi kebijakan formulasi PSH dapat dicermati dalam tabel dibawah ini.



Tabel 3.3  
Kebijakan Formulasi PSH dalam KUHP  
Thailand, Filipina, Korea, Perancis

Kebijakan Formulasi PSH	Thailand	Korea	Perancis	Filipina
Syarat - syarat dijatuhkannya PSH	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tindak pidana terhadap keamanan Raja</li> <li>- Kekerasan atau perampasan kemerdekaan Raja</li> <li>- Membuka rahasia negara</li> <li>- Tindak pidana terhadap alat pembayaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tindak pidana yang mengancam atau merebut, memisahkan wilayah nasional</li> <li>- Tindak pidana menggulingkan, atau merubah konstitusi nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan fasilitas angkatan bersenjata asing masuk wilayah Perancis</li> <li>- Melemahkan kepatuhan anggota angkatan darat, laut, udara</li> <li>- Merebut kedaulatan negara</li> <li>- Menghancurkan fasilitas negara dan pertahanan negara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak tegas mencantumkan Tindak pidana</li> </ul>
Pelaksanaan PSH	Pengurangan dan penyesuaian PSH	Tidak mengenal penyesuaian dan pengurangan	PSH dapat disesuaikan dengan urutan pidana penggantinya	30 tahun kematian perdata
Pembatasan	Anak 17 tahun kebawah tidak dikenakan PSH, wanita hamil tapi manula tidak tegas	Membatasi pada anak 14 tahun kebawah tidak boleh dikenakan PSH	Manula 60 tahun sedangkan ibu hamil dan anak tidak tegas dicantumkan	Ada pembatasan tidak boleh dikenakan PSH manula 70 tahun keatas.

<b>Kebijakan Formulasi PSH</b>	<b>Thailand</b>	<b>Korea</b>	<b>Perancis</b>	<b>Filipina</b>
	dicantumkan batas usianya			
Pidana Bersyarat	Dijatuhkan karena adanya suatu tindak pidana kealpaan atau tindak pidana ringan	Tidak diatur dalam ketentuan KUHP Korea	Tidak diatur dalam ketentuan KUHP Perancis	Tidak diatur dalam ketentuan KUHP Filipina

Bila ditinjau kebijakan formulasi PSH dalam tabel diatas nampaklah bahwa PSH dari segi waktunya (time period) dapat dijatuhkan dalam jangka waktu 50 tahun sebagaimana yang diberlakukan dalam pasal 51 KUHP tersebut. Disamping itu KUHP Thailand juga menerapkan PSH dengan syarat yakni pada tindak pidana yang sangat serius dan tindak pidana yang berkualifikasi atau dengan pemberatan yakni : (1) tindak pidana terhadap keamanan raja, (2) tindak pidana kekerasan atau perampasan kemerdekaan raja, (3) tindak pidana membuka rahasia negara, (4) tindak pidana terhadap alat pembayaran. Begitu pula dalam KUHP Korea, PSH diterapkan secara selektif terbatas pada (1) tindak pidana yang mengacaukan atau memisahkan wilayah nasional, (2) Tindak pidana menggulingkan atau merubah konstitusi nasional, sementara KUHP Perancis juga mencantumkan PSH dengan berorientasi tindak pidana yang berkualifikasi atau pemberatan seperti pemimpin Makar atau mereka yang turut serta langsung dalam tindak pidana makar tersebut. KUHP Perancis juga menganut pembatasan bahwa bagi orang yang berusia lanjut diatas 60 tahun tidak boleh dijatuhkan atau dikenakan PSH. Di dalam KUHP Filipina meski tidak mencantumkan secara tegas PSH tetapi peradilan pidana Filipina dapat mengenakan pidana yang berupa kematian perdata kepada seseorang terdakwa selama 30 tahun. KUHP Filipina juga menganut asas pembebasan PSH yakni

tidak boleh dikenakan kepada orang yang sudah berusia 70 tahun keatas.

Menyimak keempat KUHP diatas, maka kebijakan pengaturan (kebijakan formulasi) PSH dalam SHPN yang akan datang di Indonesia hendaknya berorientasi pada 2 hal yaitu (1) berkaitan dengan syarat – syarat dalam arti pada jenis tindak pidana manakah tepat dijatuhkan PSH, dengan kata lain berorientasi pada asas selektifitas (2) berkaitan dengan pemberatan – pemberatan atau kualifikasi tertentu seperti pemimpin (intelektual dadernya) garis tindak pidana yang dilakukan termasuk pengatur dalam pengatur (desainer) dari tindak pidana itu. Atau juga kualifikasi karena jabatan atau kedudukan dalam melaksanakan tindak pidana sehingga dipandang cukup beralasan untuk mengenakan PSH. Oleh karena itu kebijakan pengaturan PSH di Indonesia yang akan datang meski memperhatikan adanya keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan perlindungan individu serta memperhatikan pembatasan – Pembatasan tertentu seperti ibu hamil, anak dan orang yang berusia diatas 60 tahun. Jika ditinjau dalam konsep KUHP sebenarnya kedua ide tersebut sudah nampak dalam kebijakan formulasi konsep KUHP baru. Seperti (1) dalam tindak pidana maker Presiden dan Wakil Presiden (pasal 215), (2) maker terhadap wilayah NKRI (pasal 106), (3) makar untuk menggulingkan pemerintahan yang sah (pasal 107), (4)

penghianatan terhadap negara dan pembocoran rahasia negara (pasal 228), (5) sabotase waktu perang (pasal 235), (6) Terorisme (pasal 242), (7) pembajakan udara (pasal 257). Ke 7 jenis tindak pidana tersebut dapat dikenakan PSH. Akan tetapi haruslah dinampakkan pula pembatasan penjatuhannya seperti wanita hamil, anak dan orang lanjut usia seharusnya dipertimbangkan untuk tidak dikenakan PSH.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Pada dasarnya pengaturan terhadap pengenaan hukuman pidana seumur hidup (PSH) pada saat ini secara nyata telah tersirat dalam suatu perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun pengenaan penjara seumur hidup ini memiliki suatu gambaran bahwa pidana seumur hidup dapat dikenakan sebagai alternatif pengenaan sanksi terhadap jenis perbuatan yang dikenakan dengan pidana mati. Adapun jenis perbuatan yang dapat dikenakan dengan pidana mati ini meliputi beberapa hal yakni makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden, berhubungan dengan musuh pada perang, memberi bantuan kepada musuh pada saat terjadi peperangan, makar terhadap nyawa dengan rencana lebih dahulu, pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan, pemerasan dengan pengancaman, kekerasan yang menyebabkan orang dikapal diserang, nahkoda, pimpinan dan mereka turut serta dan sebabkan pesawat hancur dan hukuman mati. Kesemua hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, pengaturan terhadap pidana seumur hidup juga

tercermin dalam suatu rumusan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 12/Drt/1959 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Adapun pengenaan pidana seumur hidup (PSH) ini dikarenakan adanya suatu konsepsi yang menyatakan bahwa pidana seumur hidup digunakan dalam rangka melindungi hak asasi manusia yakni hak untuk hidup. Selain itu pidana seumur hidup digunakan mengganti pidana mati yang dianggap sebagai suatu penjatuhan pidana yang bersifat kejam dan atau balas dendam.

- 2) Dalam rangka pengaturan terhadap pidana seumur hidup dimasa yang akan datang hendaknya para penegak hukum memberikan suatu langkah-langkah diantaranya:

- a. Melakukan suatu tindakan pembaharuan hukum (*law reform*).

Pengenaan terhadap pembaharuan hukum ini digunakan dengan maksud untuk memberikan suatu gambaran kepada para pelaku hukum mengenai batasan dan ketentuan umum yang dapat digunakan sebagai ukuran dalam menentukan jenis penjatuhan pidana seumur hidup ataupun pidana mati. Hal ini digunakan untuk memberikan suatu “*efek jera*” bagi para

pelanggar ketentuan dengan lebih memperhatikan hak asasi manusia.

- b. Adanya pembaharuan terhadap ide pemasyarakatan dalam perumusan sanksi. Pembaharuan ini dimaksudkan agar dalam merumuskan sanksi yang dapat dikenakan kepada masing-masing pelanggar memiliki suatu ketentuan hukum yang sama agar dalam melaksanakan suatu keputusan pemberian sanksi yang berhubungan dengan penjatuhan hukuman pidana seumur hidup ini dirasakan sama antara satu dengan yang lainnya. Adanya pembaharuan ini dikenakan pada suatu upaya yang berkenaan mengenai adanya suatu sistem yang imperatif. Sistem imperatif ini tidak didasarkan dari adanya suatu kebijakan selektif dan kebijakan limitatif. Kebijakan selektif secara umum diartikan sebagai suatu kebijakan yang memilih sesuatu. Sedangkan kebijakan limitatif secara umum diartikan sebagai pembatasan dari pidana penjara.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan tersebut di atas maka diajukan saran sebagai berikut :

1. Pidana seumur hidup yang dalam perundang-undangan pidana selama ini hendaknya mengadopsi nilai-nilai dasar dalam masyarakat, sehingga tidak hanya diorientasikan pada perlindungan masyarakat, akan tetapi juga kepada perlindungan/pembinaan individu.



2. Dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia (secara nasional), maka seyogyanya diupayakan pengenaan terhadap pidana seumur hidup itu hendaknya lebih manusiawi serta tidak mempengaruhi hak-haknya sebagai manusia untuk hidup bersama dengan keluarganya.
3. Terhadap pemerintah / pembuat undang-undang hendaknya memberikan perhatian yang besar terhadap kepentingan korban dan memperlakukan narapidana seumur hidup layaknya narapidana lain.
4. Perlu adanya pedoman yang jelas mengenai penerapan pidana bersyarat yang menyangkut hakikat dan tujuan yang hendak dicapai serta ukuran-ukuran yang dikenakan dalam suatu pidana bersyarat.
5. Adanya aturan yang jelas dan tegas mengenai penjatuhan pidana berikut dengan kualifikasi terhadap penjatuhan pidana penjara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd, Gani Hakim Nusantara dan Yasabari, *Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, Tahun 1980
- Alkostar, Artidjo dan M, Sholeh Amin, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Rajawali, Tahun 1986
- Andi Hamzah, KUHP dan KUHP, Rineca Cipta, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993
- Andi Hamzah, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia, Akademika Presindo, Jakarta, 1983.
- Arkidjop, Arnan dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi Seri Hukum Pidana 1*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, Tahun 1988
- Badang Pembinaan Hukum Nasional, *Pola Pikir dan Kerangka Sistim Hukum Nasional*, Departemen Kehakiman RI 1995/1996.
- Baharuddin, Soeryobroto, *Bunga Rampai Pemasyarakatan Kumpulan Tulisan, dalam rangka hari bakti pemasyarakatan ke 38*, Jakarta, Departemen Kehakiman Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2002
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Pustaka Magister Semarang, 2007
- \_\_\_\_\_, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT, Citra Aditya Bakti. Bandung. 2005.
- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 2002.

- \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung. 1996.
- \_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, CV. Ananta, Semarang 1996.
- \_\_\_\_\_, *Konsep Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)* tahun 2006.
- \_\_\_\_\_, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1985
- \_\_\_\_\_, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua Cetakan Ke 4*, Balai Pustaka, Jakarta 1995
- Dwidja Priyatno, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, PTHB Press, 2005
- \_\_\_\_\_, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2006
- Elsam, *Pemidanaan Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2005.
- HR. Soegondo, *Fasilitas, Sarana dan Prasarana di Lembaga Pemasyarakatan*, Insania Citra Press, Jakarta, 2007
- \_\_\_\_\_, *Keamanan di lembaga Pemasyarakatan*, Insania Citra Press, Jakarta, 2007

- \_\_\_\_\_, *Sistem Pembinaan Napi di Tengah Overload Lapas Indonesia*, Insania Press, Jakarta, 2006.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2007
- J. Maleong, Laxi, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, Tahun 1998
- J.e. Sahetapy, *Dilema dalam Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Departemen Kehadiran RI. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Himpunan Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana 1980 / 1981
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal – Pasal Terpenting dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Paparannya dalam Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama 2003
- Jimly Asshidiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa Bandung, 1997.
- Jonkers, J.E. *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Tim Penerjemah Bina Aksara, PT/ Bina Aksara. Jakarta 1887.
- KUHP Korea Sebagai Perbandingan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Tahun 1987
- KUHP Malaysia Sebagai Perbandingan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Tahun 1987
- KUHP Philipina Sebagai Perbandingan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Tahun 1987
- KUHP Thailand Sebagai Perbandingan*, Galia Indonesia, Jakarta, Tahun 1987
- Lamintang dan D Simon, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Pioner, Bandung, Tahun 1992
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Position Paper KUHP Seri F3. Pemindanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP, Jakarta : 2005

- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, cet.2. Djambatan. Jakarta. 2007.
- Marc Ankle, *Social Defence A Modern Approach To Criminal Problem* Rout ledge and Kegan Paul, London, 1965
- Marjono Reksodiputro, *Jenis – Jenis Pidana Tambahan Dalam KUHP Baru*, Makalah Pada Lokakarya Bab – Bab Kodifikasi Hukum Pidana Tentang Sanksi Pidana, BPHN, Jakarta, Tanggal 5 – 7 Februari 1986
- Martiman, Prodjohamidjojo, *Sari Hukum Pidana Memakai Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Prodnnya Paramita, Jakarta, Tahun 1997
- Moeljatno, *KUHP* (Cetakan 20), Jakarta, Bina Aksara, 1999
- \_\_\_\_\_, *Membangun Hukum Pidana*, Jakarta Bina Aksara 1985
- Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, cetakan pertama, Kreasi Wacana Yogyakarta. 2005.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT, Alumni Bandung. 2005.
- \_\_\_\_\_, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 1985
- \_\_\_\_\_, *Proyeksi Hukum Materil Indonesia di masa datang Pidato Pengukuhan Guru Besar UNDIP*, Semarang, 1990
- Nyoman, Serikat Putra Jaya, 2008, *Beberapa Pemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal 39
- Oemar Seno Aji, *Hukum Pidana dan Pembangunan*, Erlangga, Jakarta 1980
- P. A.F Lamintang, *Hukum Penetensier Indonesia*, Bandung, Armico 1984
- Packer, Helbert. L, *The Limit of Criminal Sanction*, California, Stanford University Press, 1968.

- Panggabean, Mompang L. *Pokok-pokok Hukum Penetensier di Indonesia*, UKI Press, Jakarta. 2005.
- Petrus Irwan Panjaitan; Samuel Kiki Laitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, CV Indhill CO. Jakarta. 2007
- \_\_\_\_\_; Wiwik Sri Widiarty, *Pemasyarakatan Narapidana*, CV Indhill CO. Jakarta. 2008.
- Praja Soemadi, Achmad, S. *Asas – Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982
- Pujiono. *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, CV. Mandav, Bandung, 2007
- R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, PT,Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2006
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1996.
- Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Marker Maju, Bandung 1993
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, cetakan Ke.4 Aksara Baru, Jakarta. 1983.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Schaffmeister D; Keijzer N; Sitorus E,PH, *Hukum Pidana* Editor J.E Sahetapy, Agustinus Pohan, PT. Citra Adhityar Bakti, Bandung, 2007
- Soedarto, Gautama, *Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Alumni Bandung, 1973.
- \_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni Bandung, 2006.
- Soenarjati, Hartono, *Kembali Ke Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, Tahun 1984
- Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983

Tambunan, A.S.S, *Politik Berdasarkan UUD 1945*, Jakarta, Puporis Publisher, 2002

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materil Jilid I*, Kurnia Kalam Yogyakarta, 2005

Todung Mulya Lubis, Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hukum Konstitusi*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2004

Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Djakarta 2001

\_\_\_\_\_, *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2004

### **Peraturan Perundang – Undangan**

Indonesia, Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Permasalahan Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999, tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi

Indonesia, Undang – Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi

Konsep Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Tahun 2005 / 2006

UU RI. No. 12/1995 Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, Tahun 1995